



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR 1 TAHUN 2010  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
TAHUN 2010 - 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2010 - 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K-L) 2010 – 2014;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010 - 2014.**

#### Pasal 1

Menetapkan Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2010 – 2014, selanjutnya disebut Renstra Bappenas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 2

Renstra Bappenas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014.

#### Pasal 3

Renstra Bappenas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh unit kerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 4

Renstra Bappenas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat diubah dan disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika lingkungan strategis.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 2 Februari 2010

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd.

**ARMIDA S. ALISJAHBANA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Delthy S. Simatupang', written over a vertical line.

Delthy S. Simatupang



**SALINAN  
LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS  
NOMOR 1 TAHUN 2010  
TANGGAL 2 FEBRUARI 2010**

**RENCANA STRATEGIS  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
TAHUN 2010 – 2014**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**SALINAN  
LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS  
NOMOR 1 TAHUN 2010  
TANGGAL 2 FEBRUARI 2010**

**RENCANA STRATEGIS  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
TAHUN 2010 – 2014**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas periode 2010-2014 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kementerian PPN/Bappenas periode 2005-2009, analisa atas pendapat para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di tingkat pusat dan daerah, analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global maupun nasional, dan Rencana Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas. Selain itu, Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2010-2014, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Indonesia 2014, sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2010-2014.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Kementerian PPN/Bappenas harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Kementerian PPN/Bappenas periode 2010-2014 yaitu “Mewujudkan Kementerian PPN/Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara”, maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Kementerian PPN/Bappenas periode 2010-2014 yaitu meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada RPJMN 2010-2014.

Jakarta, Januari 2010

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Armida S. Alisjahbana

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Gambar .....	iii
Daftar Tabel .....	iv
Daftar Anak Lampiran .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Kondisi Umum .....	1
1.2. Potensi dan Permasalahan .....	6
a. Peraturan Perundang-undangan .....	6
b. Sumber Daya Manusia Perencana .....	7
c. Desentralisasi dan Otonomi Daerah .....	8
d. Globalisasi .....	10
<b>BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS .....</b>	<b>16</b>
2.1. Visi Kementerian PPN/Bappenas .....	17
2.2. Misi Kementerian PPN/Bappenas .....	19
2.3. Tujuan Kementerian PPN/Bappenas .....	20
2.4. Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas .....	21
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI .....</b>	<b>23</b>
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional .....	23
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian PPN/Bappenas ....	25
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>32</b>



## DAFTAR GAMBAR

Diagram 1	:	Sistem Manajemen Pembangunan .....	4
Diagram 2	:	Keterkaitan Kondisi Saat Ini dan Dampaknya .....	5
Diagram 3	:	Peta Strategi Tahun 2010-2014 Kementerian PFN/Bappenas .....	17

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Peran Kementerian PPN/Bappenas .....	3
Tabel 2	: Identifikasi Potensi dan Permasalahan Strategis serta Tindaklanjut Kementerian PPN/Bappenas: Lingkungan Strategis Eksternal Nasional: Peraturan Perundang-undangan dan SDM Perencana .....	8
Tabel 3	: Identifikasi Potensi dan Permasalahan Strategis serta Tindaklanjut Kementerian PPN/Bappenas: Lingkungan Strategis Eksternal Nasional: Desentralisasi dan Otonomi Daerah .....	10
Tabel 4	: Identifikasi Potensi dan Permasalahan Strategis serta Tindaklanjut Kementerian PPN/Bappenas: Lingkungan Strategis Eksternal Luar Negeri: Globalisasi .....	12
Tabel 5	: Profil Sumber Daya Manusia Kementerian PPN/Bappenas Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan .....	13
Tabel 6	: Identifikasi Potensi dan Permasalahan Strategis serta Tindaklanjut Kementerian PPN/Bappenas: Lingkungan Strategis Internal di Kementerian PPN/ Bappenas .....	14
Tabel 7	: Hubungan Visi, Misi, hingga Program dan Kegiatan 2010-2014 Kementerian PPN/Bappenas .....	29

## DAFTAR ANAK LAMPIRAN

Formulir	:	Kontrak Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Presiden
Formulir 1.a.	:	Target Renstra Kementerian PPN/Bappenas
Formulir 1.b.	:	Target Renstra Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas
Formulir 1.c.	:	Target Renstra Unit Kerja Eselon II Kementerian PPN/Bappenas
Formulir 2	:	Kebutuhan Pendanaan Pembangunan di Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2010 – 2014

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Kondisi Umum

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (*civil liberty*) dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (*governance*) sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (*climate change*), ketegangan lintas-batas antarnegara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) yang diberi tugas dalam perencanaan pembangunan nasional, untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut. Peran Kementerian PPN/Bappenas sangat strategis, karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional. Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas dituntut memiliki kemampuan untuk menjembatani kesenjangan dan menekan egoisme yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur”. Peran dan tugas Kementerian PPN/Bappenas di atas adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: a) untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; c) menjamin keterkaitan

dan ...



dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk mencapai kelima tujuan tersebut, maka Kementerian PPN/Bappenas harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara optimal dan akuntabel.

Perpres Nomor 47 Tahun 2009 dan Perpres Nomor 82 Tahun 2007 menyebutkan bahwa tugas pokok Kementerian PPN/Bappenas adalah merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, tugas pokok tersebut dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) fungsi, yaitu: 1) penyusunan rencana pembangunan nasional; 2) koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional; 3) pengkajian kebijakan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional; 4) penyusunan program pembangunan sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan bersama-sama dengan Departemen Keuangan; 5) koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait; 6) koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas; 7) fasilitasi dan pembinaan kegiatan instansi pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional; 8) penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden; serta 9) penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, sumber daya manusia, keuangan, kearsipan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.

Mengacu pada landasan di atas, pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas mengerucut menjadi 4 (empat) peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai (1) pengambil kebijakan/keputusan (*policy maker*), (2) koordinator, (3) *think-tank*, dan (4) *administrator*. Keempat peran tersebut dijabarkan ke dalam pelaksanaan berbagai kegiatan strategis. Sebagai **pengambil kebijakan/keputusan**, Kementerian PPN/Bappenas menentukan kebijakan dan program dalam rencana pembangunan nasional baik jangka panjang (RPJPN), menengah (RPJMN) maupun tahunan (RKP). Untuk rencana kerja pemerintah (RKP) yang bersifat tahunan, disusun berikut perkiraan anggarannya, sedangkan perkiraan anggaran untuk RPJMN dimulai sejak RPJMN 2010-2014. Selain tugas perencanaan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas juga berperan dalam turut menentukan kebijakan-kebijakan penanganan permasalahan yang mendesak dan berskala besar, seperti penanganan pasca bencana alam dan perubahan iklim (*climate change*).

Sebagai *think tank*, Kementerian PPN/Bappenas melakukan kajian/telaahan/evaluasi kebijakan pembangunan baik sebagai masukan untuk penyusunan rencana pembangunan nasional maupun untuk perumusan kebijakan-kebijakan strategis lainnya. Sebagai **koordinator**, Kementerian PPN/Bappenas antara lain melakukan

berbagai ...



berbagai kegiatan koordinatif dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik dalam rangka pelaksanaan tugas utama di bidang perencanaan maupun tugas-tugas lainnya dari Presiden/Pemerintah seperti penanganan pasca bencana yang memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan dengan lembaga lain; koordinasi perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan; koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, dan pengalokasian dana untuk pembangunan bersama Kementerian/Lembaga (K/L) terkait; serta koordinasi kegiatan strategis sesuai penugasan.

Kemudian, kegiatan sebagai **administrator**, antara lain pengelolaan dokumen perencanaan termasuk pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN); penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan; penyusunan dan pengelolaan laporan hasil evaluasi; serta pembinaan dan pelayanan administrasi umum.

<b>Tabel 1</b> <b>PERAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL</b>			
<b>Pengambil Keputusan (policy/decision maker)</b>	<b>Think Tank</b>	<b>Koordinator</b>	<b>Administrator</b>
<b>PENJABARAN :</b>  1. <b>Perencanaan:</b> penyusunan rencana pembangunan nasional jangka panjang, menengah, pendek/ tahunan. 2. <b>Penganggaran:</b> penyusunan alokasi pendanaan (indikatif) sebagai bahan penyusunan RAPBN bersama dengan Depkeu. 3. <b>Pengendalian dan evaluasi</b> terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. 4. <b>Pengambilan keputusan</b> dalam penanganan permasalahan mendesak dan berskala besar, sesuai penugasan.	<b>PENJABARAN :</b>  1. Pengkajian kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, dan kebijakan lainnya. 2. Fasilitasi pembinaan instansi/unit perencanaan di pusat dan di daerah. 3. Kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi.	<b>PENJABARAN :</b>  1. Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan. 2. Koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana pembangunan bersama K/L terkait. 3. Koordinasi kegiatan strategis penanganan permasalahan mendesak dan berskala besar, sesuai penugasan.	<b>PENJABARAN :</b>  1. Pengelolaan dokumen perencanaan termasuk pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN). 2. Penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. 3. Penyusunan dan pengelolaan laporan hasil evaluasi. 4. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum.

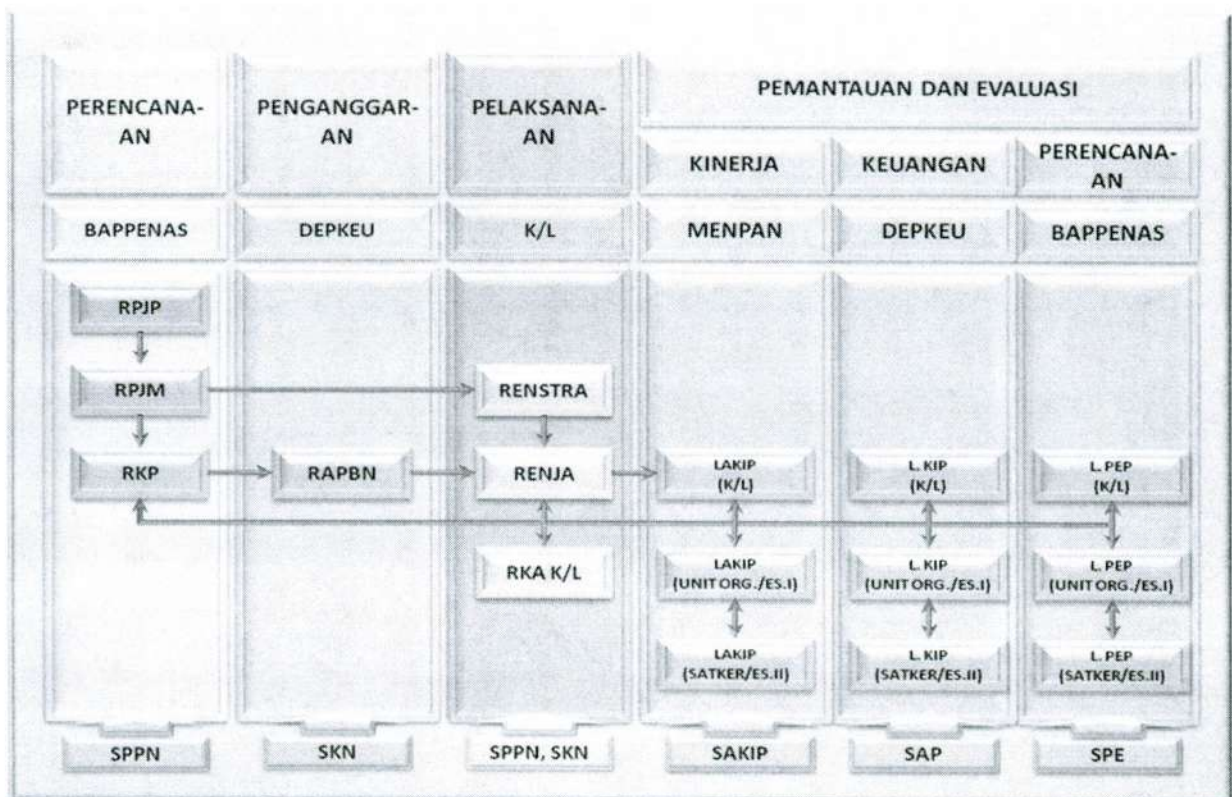
Selama periode 2004-2009, pelaksanaan keempat peran tersebut telah diupayakan secara optimal. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan persoalan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, antara lain belum sepenuhnya selaras antara rencana pembangunan (RPJPN, RPJMN, RKP, RPJMD, RKPD) dengan pelaksanaannya baik di pusat maupun daerah. Terkait dengan munculnya berbagai masalah baru dan mendesak, seperti penanganan bencana

alam ...

alam, penanggulangan kemiskinan, penanganan terhadap dampak pemanasan global, dan antisipasi terhadap fluktuasi harga bahan bakar minyak, yang mempengaruhi beban subsidi pemerintah, Kementerian PPN/Bappenas dituntut untuk antisipatif dan proaktif serta mampu mengembangkan sistem pendeteksian dini (*early warning system*) sehingga pencapaian tujuan pembangunan nasional tetap terjamin.

Dalam pelaksanaan peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai *think tank*, optimalisasi sumber daya manusia yang ada perlu terus ditingkatkan secara solid dan terintegrasi agar dapat meningkatkan kualitas hasil analisa, telaahan, dan kajian kebijakan pembangunan untuk membantu perumusan kebijakan pembangunan nasional yang tepat, terarah dan dapat dilaksanakan. Salah satu masalah strategis yang harus juga diselesaikan Kementerian PPN/Bappenas terutama sebagai *think tank* adalah membangun dan mengintegrasikan sistem manajemen pembangunan yang selama ini melibatkan berbagai instansi, perguruan tinggi dan organisasi profesi, diatur dengan kebijakan atau peraturan yang belum terintegrasi dengan baik, sebagaimana tampak dalam Diagram 1.

Diagram 1  
SISTEM MANAJEMEN PEMBANGUNAN

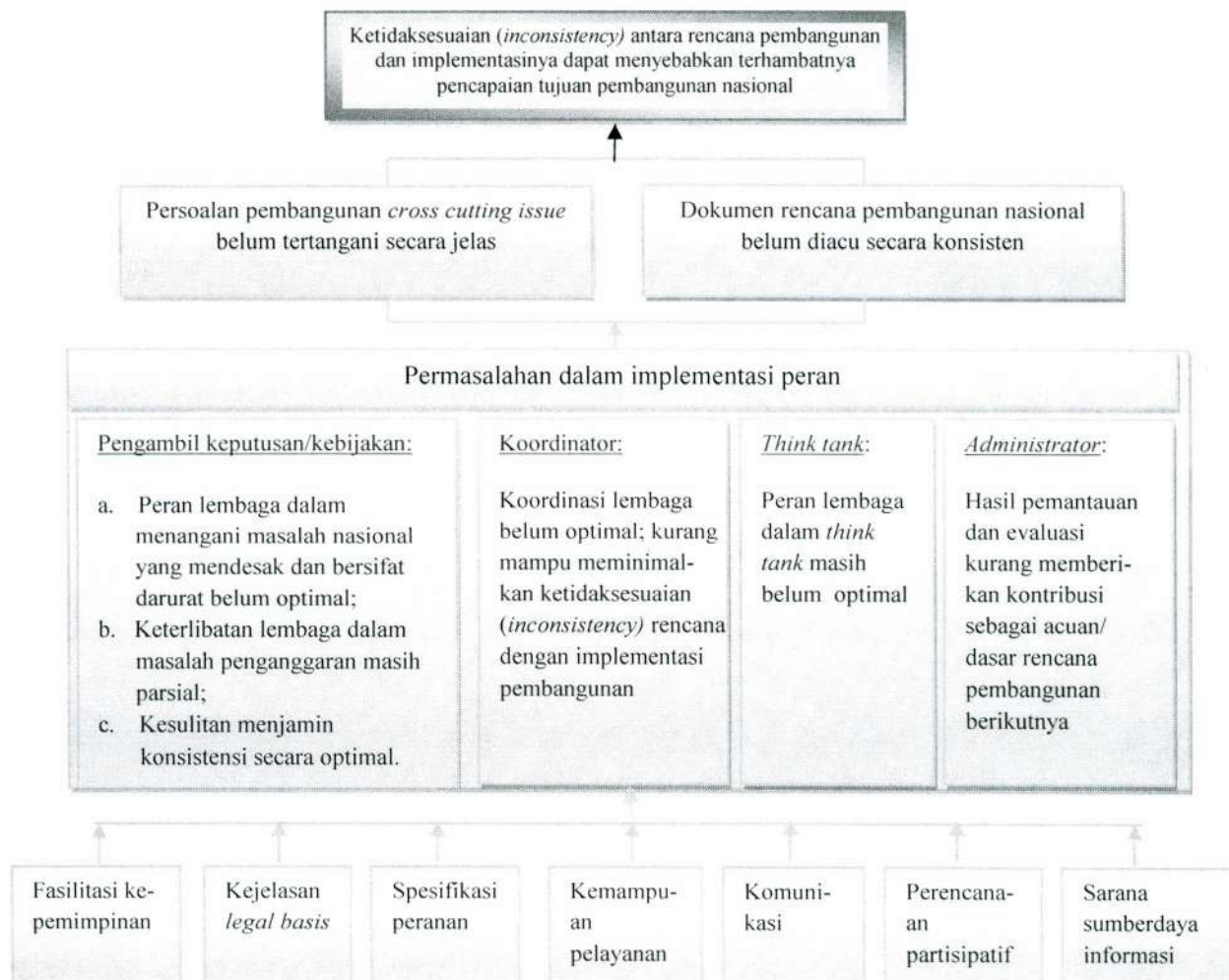


Di samping ...



Di samping itu, terus dilakukan upaya perbaikan untuk mencapai keselarasan antara perencanaan dan penganggaran, yang ditunjukkan dengan semakin mendekatnya antara sasaran dalam dokumen perencanaan dengan penganggaran. Namun demikian, keselarasan tersebut masih belum sepenuhnya sesuai harapan karena terbatasnya instrumen pengendalian dan pengawasan pembangunan, serta belum optimalnya mekanisme *reward and punishment*. Masih terdapat ketidakselarasan antara rencana pembangunan, penganggaran dan pelaksanaan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana terlihat dalam Diagram 2.

**Diagram 2:**  
**Keterkaitan Kondisi saat ini dan Dampaknya**



Berdasarkan kondisi obyektif yang dipaparkan di atas, kapasitas Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional perlu diperkuat agar dapat memastikan berjalannya proses pembangunan nasional secara baik, antara lain dengan mengawal dan memperkuat sistem manajemen pembangunan ...



pembangunan yang solid. Kementerian PPN/Bappenas harus semakin mampu menjadi fasilitator dalam mengarahkan proses pembangunan secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan dinamika heterogenitas sumber daya, persepsi, dan kepentingan sektoral dan kedaerahan. Keberhasilan dalam memfasilitasi dan mempertemukan komitmen para pemangku kepentingan akan semakin meningkatkan kinerja institusi dan sekaligus memantapkan keberadaannya. Untuk menjadi fasilitator yang efektif, Kementerian PPN/Bappenas perlu terus melakukan perbaikan, dan mengembangkan tradisi yang kondusif bagi berkembangnya individu dan kelompok pembelajar menuju organisasi pembelajar (*organizational learning*). Di samping itu, kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, dan keterkaitan (interrelasi) antarbudaya dan negara, menuntut Kementerian PPN/Bappenas untuk dapat melakukan evaluasi dan mengadaptasinya dalam pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan etos tersebut, diharapkan mampu menjadi katalisator dalam proses pencapaian tujuan pembangunan nasional.

## **1.2 Potensi dan Permasalahan**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan Kementerian PPN/Bappenas. Berikut ini beberapa kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap Kementerian PPN/Bappenas.

### **a. Peraturan Perundang-undangan**

Penyusunan rencana pembangunan nasional, sebagai bagian dari Sistem Manajemen Pembangunan tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang berlaku baik berupa UU, PP, Perpres maupun Peraturan/Keputusan Menteri terkait. Disadari bahwa seluruh peraturan perundangan-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional (Tabel 2). Sistem manajemen pembangunan dibangun berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- 1) Sistem perencanaan mengacu kepada UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional yang merupakan turunan UU Nomor 25 Tahun 2004, PP Nomor 8/2008 tentang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang merupakan turunan UU Nomor 32 Tahun 2004, dan Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Renstra K/L 2010-2014.

Sistem ...



- 2) Sistem penganggaran mengacu kepada UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta peraturan pelaksanaannya, antara lain: PP Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang merupakan turunan dari UU Nomor 17 Tahun 2003 dan PP Nomor 59 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah turunan dari UU Nomor 33 Tahun 2004.
- 3) Sistem pelaksanaan mengacu kepada UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan pelaksanaannya, di antaranya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan merupakan bagian dari sistem pelaksanaan.
- 4) Sistem pelaporan mengacu pada UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berbagai peraturan yang bersifat pelaksanaan antara lain PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang sedang disempurnakan dengan Perpres tentang Sistem AKIP.

#### **b. Sumber Daya Manusia Perencana**

Di samping masalah peraturan perundang-undangan tersebut, juga terdapat masalah lain, yaitu terbatasnya sumberdaya manusia perencana pembangunan di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan secara baik dan akuntabel. Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan secara prosedural, namun untuk menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas, instansi-instansi tersebut diharapkan dapat menyediakan kualitas perencana yang berkualitas secara memadai. Tabel 2 memberi gambaran potensi, permasalahan dan dampak dari peraturan perundang-undangan dan sumber daya manusia aparatur di bidang perencanaan pembangunan.

Tabel ...



<p style="text-align: center;"><b>Tabel 2</b>  <b>IDENTIFIKASI POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS SERTA TINDAK LANJUT TERHADAP PERAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS</b></p>		
<p style="text-align: center;"><b>LINGKUNGAN STRATEGIS EKSTERNAL NASIONAL: PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN SDM PERENCANA</b></p>		
<b>POTENSI</b>	<b>PERMASALAHAN</b>	<b>TINDAK LANJUT</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beberapa peraturan perundang-undangan mengamanatkan pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional melalui perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah</li> <li>2. Kuantitas SDM aparatur tingkat pusat/daerah cukup memadai.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya sumberdaya yang kompeten dalam meningkatkan kualitas rencana pembangunan.</li> <li>2. Perubahan lingkungan strategis.</li> <li>3. Belum memadainya kompetensi perencana di tingkat pusat dan daerah.</li> <li>4. Belum optimalnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi dalam memberikan kontribusi pada kualitas SDM aparatur negara</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kerjasama antarlembaga perencanaan baik pusat maupun daerah serta penguatan peran dan kewenangan lembaga perencanaan, memantapkan ketatalaksanaan dan meningkatkan kualitas aparatur perencanaan.</li> <li>2. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan, serta rencana tindak yang terukur dan jelas.</li> <li>3. Mengembangkan sistem evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.</li> <li>4. Pembangunan sistem dan peningkatan kualitas data/informasi perencanaan pembangunan.</li> <li>5. Peningkatan kompetensi SDM aparatur perencana di tingkat pusat dan daerah melalui diklat, bimbingan teknis, focus group discussion, seminar kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi di pusat dan di daerah.</li> </ol>

### c. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Pelaksanaan desentralisasi pemerintahan di era reformasi disadari masih menimbulkan penafsiran yang beragam sehingga terkesan menciptakan kondisi yang kurang dapat dikendalikan. Masih ada kecenderungan sebagian pemerintah daerah yang menafsirkan bahwa mereka memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam mengurus rumah tangganya tanpa memperhatikan hubungan koordinasi dengan pemerintah propinsi dan pusat. Banyak fakta yang menunjukkan bahwa implementasi otonomi daerah memunculkan fenomena yang sebelumnya tidak terpikirkan. Misalnya beberapa kasus konflik antardaerah dalam melakukan eksplorasi dan pengelolaan sumberdaya alam, merenggangnya hubungan antarkelompok karena masalah-masalah geografis wilayah sehingga menimbulkan berbagai konsekuensi, seperti ketidakamanan dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi otonomi daerah belum sepenuhnya disikapi sebagai peluang untuk melakukan sinergi dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam arti luas, tetapi cenderung lebih dimaknai sebagai upaya menyejahterakan masyarakat daerahnya sendiri. Dalam konteks ini, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat didasari dengan pemahaman yang tidak tepat, sehingga menimbulkan dampak yang menghambat upaya mensinergikan program-program pembangunan antardaerah.



Ada beberapa dampak dari pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. **Pertama**, kebijakan desentralisasi dan otonomi mendorong terjadinya pemekaran daerah yang cenderung menimbulkan masalah baru bagi daerah yang bersangkutan, seperti konflik antardaerah dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam, dan keberlanjutan pembangunan di daerah-daerah pemekaran. Hal ini disebabkan beberapa faktor, yaitu ketidaksiapan pemerintah daerah yang baru untuk melakukan akselerasi pembangunan dikarenakan keterbatasan sumber daya alam, sarana dan prasarana, serta sumber daya aparatur. Akibatnya, terjadi kesenjangan kesejahteraan antara daerah induk dengan daerah hasil pemekaran. Cepat atau lambat, kondisi ini turut mendorong peningkatan jumlah masyarakat miskin di daerah tersebut.

**Kedua**, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah cenderung menimbulkan potensi konflik komunal, yang terjadi pada suatu komunitas dengan karakteristik sosio budaya yang berbeda. Fakta bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dan memiliki laut yang luas dengan beragam suku dan budaya, tidaklah dapat disangkal. Keragaman geografis, suku, budaya, dan agama atau keyakinan memunculkan karakteristik personal atau komunitas yang berbeda. Selama masa Orde Baru, komunikasi yang terbangun adalah komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah tampak jelas dalam program-program pembangunan. Secara faktual kondisi ini kurang menguntungkan bagi upaya pengembangan saling pengertian antar suku dan kelompok masyarakat tentang keragaman suku dan heterogenitas di Indonesia. Fenomena konflik komunal seperti yang terjadi di beberapa daerah dalam sepuluh tahun terakhir dapat menjadi bukti konsekuensi kekurangberhasilan akulturasi ini. Di samping itu terdapat faktor-faktor lain seperti kekurangpedulian elit politik, perilaku korup dan mementingkan kelompok atau golongan sendiri, yang telah memberikan pengaruh sangat kuat bagi terbentuknya ketidakpercayaan antarelemen masyarakat. Ketidakpercayaan tersebut merupakan kondisi yang sangat mengkhawatirkan dan dapat menjadi penghambat bagi kelancaran proses pembangunan dan pencapaian tujuan nasional.

**Ketiga**, dampak lainnya adalah jumlah penduduk yang bertambah, semakin merosotnya mutu lingkungan dan sumberdaya alam serta fenomena bencana alam yang terjadi berturut-turut dalam beberapa tahun terakhir ini. Meningkatnya jumlah penduduk akibat pemerintah daerah kurang tanggap terhadap masalah keluarga berencana, menuntut penyediaan berbagai kebutuhan pokok, termasuk pangan. Apabila kegiatan ekonomi terus terpusat di Jawa, maka ketersediaan lahan subur akan semakin berkurang. Lahan pertanian yang subur di Jawa secara cepat akan beralih fungsi menjadi lahan non-pertanian. Konversi lahan akan menurunkan kondisi jaringan irigasi dan prasarana irigasi di lahan produksi yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya produktivitas hasil pertanian.

Wawasan lingkungan belum dihayati secara penuh. Aktivitas peralihan fungsi kawasan hutan menjadi pemukiman, perkebunan, persawahan,

pertambahan ...



pertambakan, perindustrian, pertambangan; dan masalah kebakaran hutan, serta makin meningkatnya pembalakan liar (*illegal logging*) mengakibatkan deforestasi atau berkurangnya kawasan hutan, perubahan iklim serta terganggunya kondisi tata air. Gejala kerusakan tata air terlihat dari berkurangnya ketersediaan air tanah terutama di daerah perkotaan, turunnya debit air waduk dan sungai pada musim kemarau yang mengancam pasokan air untuk pertanian dan pengoperasian pembangkit listrik tenaga air (PLTA), membesarnya aliran air permukaan yang mengakibatkan meningkatnya ancaman bencana banjir dan longsor pada musim penghujan. Sementara itu, laju kebutuhan air terus bertambah, diperkirakan rata-rata meningkat sebesar 10% per tahun. Tabel 3 di bawah ini menjelaskan potensi, pemasalahan desentralisasi dan otonomi daerah serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya terkait dengan peran Kementerian PPN/Bappenas.

Tabel 3 IDENTIFIKASI POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS SERTA TINDAKLANJUT TERHADAP PERAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS		
LINGKUNGAN STRATEGIS EKSTERNAL NASIONAL: DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH		
POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1. Semangat otonomi dan desentralisasi yang kuat.	1. Meningkatnya konflik antardaerah dalam pemanfaatan/pengelolaan sumberdaya alam	1. Peningkatan fasilitasi dalam proses perencanaan pembangunan.
2. Potensi sumber daya daerah menjadi faktor pendukung pencapaian tujuan pembangunan.	2. Merenggangnya hubungan antarkelompok karena masalah geografis wilayah.	2. Perlu ditingkatkan koordinasi antara pusat dengan daerah, untuk menyusun dan menerapkan kebijakan/program penanganan permasalahan lingkungan hidup, sumber daya alam, kemiskinan (dan juga permasalahan lain) secara komprehensif dan terpadu.
3. Kultur dan sosial yang kuat menjadi faktor kunci keberhasilan dalam pembangunan.	3. Semakin merosotnya mutu lingkungan dan sumber daya alam.	
4. Jumlah penduduk dan geografis yang cukup memadai.	4. Angka kemiskinan yang masih besar.	

#### d. Globalisasi

Di samping persoalan lingkungan eksternal nasional di atas, globalisasi yang merupakan faktor lingkungan eksternal/internasional diyakini semakin berpengaruh dalam proses pembangunan Indonesia, seperti arus pandangan dan nilai-nilai (*values*) demokrasi dan kemajuan teknologi informasi (TI). Globalisasi menegaskan adanya hubungan timbal balik antara perkembangan suatu wilayah dengan kecenderungan global. Perkembangan kebudayaan masyarakat dan peradaban modern ditandai dengan semakin menyatunya atau semakin diakuinya



nilai-nilai (*values*) universal sebagai nilai dasar bersama. Nilai-nilai universal tersebut berkembang dari keseluruhan proses perjalanan bangsa-bangsa di dunia.

Demokrasi menjadi salah satu nilai justifikasi yang menentukan daya terima masyarakat dunia terhadap suatu pemerintahan. Implikasinya, setiap pemerintahan dituntut untuk mampu menerapkan prinsip-prinsip demokratisasi dalam melayani masyarakat sekaligus warga dunia. Setiap negara dituntut untuk meningkatkan kemampuannya dalam melakukan pelayanan kepada pelanggannya baik internal maupun eksternal dengan lebih terbuka, transparan, akuntabel, dalam kerangka hukum yang kuat. Arus pandangan global tersebut turut memicu terjadinya gerakan reformasi pada tahun 1998 yang menuntut pengelolaan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, yang antara lain transparansi, akuntabilitas, taat hukum, partisipasi, desentralisasi, dan keterbukaan.

Pada sisi lain, arus globalisasi juga telah meningkatkan peran-peran swasta dan masyarakat internasional yang diwakili oleh korporasi-korporasi yang bekerja pada tingkat multinasional ataupun kelembagaan swadaya masyarakat untuk bekerja lintas batas negara. Kelembagaan swasta dan masyarakat ini telah bekerja menggunakan prinsip-prinsip manajemen (birokrasi) yang sangat erat terkait dengan tipologi budaya, nilai-nilai, dan paradigma modern yang dibawanya. Dalam konteks ini, setiap pemerintahan dituntut untuk memahami interaksi dan komunikasi multikultural dalam pergaulan internasional, dan untuk mengelola keseluruhan kepentingan yang sangat beragam dalam konteks kepentingan nasional.

Kemudian, gelombang kecepatan teknologi informasi telah menghantarkan perubahan-perubahan yang sangat cepat. Perkembangan teknologi informasi telah memacu suatu cara baru dalam kehidupan, dimulai dari awal kehidupan hingga berakhirnya kehidupan. Kehidupan seperti ini dikenal dengan *e-life*, artinya kehidupan ini sudah dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan secara elektronik. Saat ini sedang semarak muncul kegiatan yang dimulai dengan awalan huruf *e* seperti *e-commerce*, *e-government*, *e-education*, *e-library*, *e-journal*, *e-medicine*, *e-laboratory*, *e-biodiversity*, dan yang lainnya yang berbasis elektronika. Perkembangan teknologi informasi (TI) telah menempatkan informasi menjadi industri tersendiri. Informasi telah menjadi material yang strategis bagi setiap institusi atau perusahaan. Sehingga setiap institusi/perusahaan memerlukan unit pengolahan data dan informasi tersendiri dengan menerapkan berbagai teknologi pengolahan informasi yang relevan. Namun demikian, seperti kemajuan di bidang apa pun, kemajuan teknologi informasi selain menimbulkan efek positif juga mengakibatkan terjadinya efek negatif dalam bentuk ancaman terhadap keamanan dan bidang-bidang lainnya.

Nilai informasi yang begitu penting dan strategis tersebut dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara dalam mengimplementasikan kebijakan dan mempersiapkan SDM agar memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

Karena ...



Karena pada dasarnya apabila adopsi inovasi tidak dilakukan dengan meningkatkan kemampuan mengelolanya, bukan tidak mungkin TI dapat menjadi faktor delegitimasi terhadap birokrasi suatu negara. Secara praktis perkembangan TI telah memberikan banyak kemudahan dalam menunjang aktivitas manusia. Teknologi juga memfasilitasi aktivitas-aktivitas yang dahulunya sulit dilakukan menjadi mudah, misalnya mengerjakan beberapa aktivitas kantor di rumah dan tidak perlu datang ke kantor. Kantor dalam pengertian fisik, saat ini bukanlah tempat satu-satunya dimana pegawai suatu organisasi harus mengerjakan atau menyelesaikan tugas-tugasnya. Beberapa pekerjaan dapat dilakukan di rumah, rapat dengan pimpinan dan kelompok kerja di rumah dengan menggunakan *internet working* tanpa harus kehilangan waktu dan biaya karena kemacetan, transportasi, dan sebagainya. Tabel 4 menjelaskan pengaruh globalisasi terhadap peran Kementerian PPN/Bappenas.

<p><b>Tabel 4</b>  <b>IDENTIFIKASI POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS SERTA TINDAK LANJUT TERHADAP PERAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS</b></p>		
LINGKUNGAN STRATEGIS EKSTERNAL LUAR NEGERI: GLOBALISASI		
POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1. Semakin diakuinya nilai-nilai ( <i>values</i> ) universal.	1. Kemampuan adaptasi (demokratisasi) yang belum sesuai harapan.	Peningkatan kemampuan pemerintah (Kementerian PPN/Bappenas) dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional yang dapat menjawab tantangan global yang semakin kompleks dengan perubahan yang sangat cepat.
2. Semakin meningkatnya peran swasta dan masyarakat internasional.	2. Kemampuan persaingan yang lemah.	
3. Semakin meningkatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan.	3. Kemampuan sumber daya yang masih terbatas.	

Di samping faktor eksternal, juga terdapat beberapa faktor internal yang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan peran Kementerian PPN/Bappenas. Keberadaan sumber daya Kementerian PPN/Bappenas yang meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dan peran Kementerian PPN/Bappenas dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis.

Namun sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan visi, misi dan tujuannya. Beberapa masalah yang dihadapi dalam pemanfaatan sumber daya tersebut harus segera diatasi agar potensi-potensi yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik. Salah satu contoh adalah potensi sumber daya manusia yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sangat memadai sebagaimana tercermin pada Tabel 5.

Dengan ...

Dengan SDM yang berpendidikan tinggi, Kementerian PPN/Bappenas diharapkan dapat melaksanakan tugas-tugas lembaga dan unit kerjanya secara lebih baik. Di samping potensi-potensi positif dari SDM tersebut, Kementerian PPN/Bappenas juga dihadapkan pada beberapa potensi permasalahan, yaitu:

- SDM tersebut belum sepenuhnya diarahkan kepada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- pola pembinaan pegawai, sejak rekrutmen, mutasi, rotasi dan promosi hingga pensiun masih belum sepenuhnya berbasiskan pada kompetensi;
- penerapan sistem merit dalam manajemen sumber daya manusia masih belum optimal, dan perlu terus ditingkatkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan pegawai.

**Tabel 5**  
**Profil Sumber Daya Manusia Kementerian PPN/Bappenas**  
**Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan**

No.	Golongan	Pendidikan							Total
		S-3	S-2	S-1	D-III	SLTA	SLTP	SD	
1	IV/e	5	4	-	-	-	-	-	9
2	IV/d	14	15	1	-	-	-	-	30
3	IV/c	21	25	2	-	-	-	-	48
4	IV/b	15	74	4	-	-	-	-	93
5	IV/a	16	75	11	-	-	-	-	102
	<i>Total Gol IV</i>	71	193	18	0	0	0	0	282
6	III/d	5	43	14	-	-	-	-	62
7	III/c	-	27	12	4	2	-	-	45
8	III/b	-	18	45	5	15	-	-	83
9	III/a	-	1	116	4	41	-	-	162
	<i>Total Gol III</i>	5	89	187	13	58	0	0	352
10	II/d	-	-	3	1	26	-	-	30
11	II/c	-	-	4	15	17	3	-	39
12	II/b	-	-	3	-	65	9	-	77
13	II/a	-	-	-	-	7	19	26	52
	<i>Total Gol II</i>	0	0	10	16	115	31	26	198
14	I/d	-	-	-	-	2	2	2	6
15	I/c	-	-	-	-	-	-	-	0
16	I/b	-	-	-	-	-	-	-	0
17	I/a	-	-	-	-	-	-	-	0
	<i>Total Gol I</i>	0	0	0	0	2	2	2	6
<b>Total</b>		<b>76</b>	<b>282</b>	<b>215</b>	<b>29</b>	<b>175</b>	<b>33</b>	<b>28</b>	<b>838</b>
		<b>9.1%</b>	<b>33.7%</b>	<b>25.7%</b>	<b>3.5%</b>	<b>20.9%</b>	<b>3.9%</b>	<b>3.3%</b>	<b>100%</b>

Data September 2009



Selain masalah sumber daya manusia, permasalahan lainnya adalah pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja, sarana dan prasarana sebagai alat mobilitas dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan yang masih terbatas, pedoman kerja yang relatif masih terbatas, serta masalah kelembagaan (struktur organisasi) yang masih memerlukan penataan. Adapun gambaran potensi, permasalahan, dan tindak lanjut penyelesaiannya dapat dilihat pada Tabel 6.

<p style="text-align: center;"><b>Tabel 6</b>  <b>IDENTIFIKASI POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS SERTA TINDAKLANJUT TERHADAP PERAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS</b></p>		
<p style="text-align: center;"><b>LINGKUNGAN STRATEGIS INTERNAL: DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS</b></p>		
<b>POTENSI</b>	<b>PERMASALAHAN</b>	<b>TINDAK LANJUT</b>
1. SDM dengan tingkat pendidikan yang tinggi	1. Manajemen SDM yang belum mengarah kepada peningkatan kinerja pegawai. 2. Belum ada kebijakan nasional yang jelas yang mengkaitkan antara kinerja pegawai dengan kinerja lembaga/unit kerja.	1. Mengembangkan dan menerapkan manajemen kinerja, yang mengkaitkan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja individu. Manajemen kinerja tersebut mencakup: indikator kinerja lembaga, unit kerja dan individu/pegawai, pengukuran dan evaluasi kinerjanya, serta penerapan penghargaan dan sanksi ( <i>reward and punishment</i> ) termasuk penerapan "remunerasi"/ tunjangan kinerja secara akuntabel.
2. Anggaran yang cukup memadai	3. Pengelolaan kegiatan dan anggaran yang belum sepenuhnya mengarah kepada peningkatan kinerja lembaga dan unit kerja. 4. Kurang terarahnya penentuan prioritas penggunaan anggaran sesuai dengan arah dan tujuan organisasi.	2. Pengembangan manajemen SDM berbasis kompetensi dan sistem merit. 3. Perlu diperjelas arah kebijakan organisasi dalam penggunaan anggaran.
3. Kualitas sarana dan prasarana cukup memadai.	5. Kuantitas sarana dan prasarana belum tercukupi.	4. Perlu ditingkatkan kuantitas sarana dan prasarana serta sistem pengelolaan aset.
4. Tersedianya ketatalaksanaan (pedoman prosedur kerja, <i>standard operating procedures/SOP</i> ) untuk mendukung pelaksanaan tupoksi.	5. Masih kurangnya ketatalaksanaan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan organisasi.	5. Perlu dilengkapi ketatalaksanaan (prosedur kerja, SOP) untuk mendukung kebutuhan organisasi.
5. Landasan hukum kelembagaan cukup jelas	6. Masih belum optimalnya kapasitas kelembagaan, khususnya struktur organisasi, untuk mendukung peningkatan kinerja Kementerian PPN/ Bappenas.	6. Perlu dilakukan penataan kelembagaan (struktur, tupoksi, indikator kinerja utama kelembagaan, prosedur kerja, dan sebagainya) agar dapat mendukung peningkatan kinerja lembaga dan unit kerja. 7. Sosialisasi kepada para pejabat dan staf tentang upaya dan hasil penataan kelembagaan tersebut di atas.

Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang telah diuraikan di atas akan berdampak kepada pelaksanaan peran Kementerian PPN/Bappenas dalam periode 2010-2014. Berbagai permasalahan di atas, baik eksternal maupun internal merupakan **tantangan** yang harus di atasi Kementerian PPN/Bappenas.

Untuk ...

Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas menyusun Rencana Strategis Tahun 2010-2014, yang berisi visi, misi dan tujuan organisasi Kementerian PPN/Bappenas pada periode 2010-2014 dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja utama (*key performance indicators*) dari lembaga hingga unit kerja eselon II. Salah satu solusi atau tindak lanjut strategis di internal Kementerian PPN/Bappenas untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut adalah dengan membangun dan menerapkan manajemen kinerja, yang menghubungkan antara kinerja lembaga, unit kerja hingga kinerja individu secara terpadu dalam suatu sistem manajemen kinerja. Untuk kinerja lembaga dan unit kerja, sudah ada Renstra, Renja dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP, walaupun perlu disempurnakan). Sedangkan kinerja pegawai masih menggunakan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) yang sulit digunakan untuk menilai kinerja pegawai secara akuntabel. Walaupun manajemen kinerja yang mengintegrasikan kinerja lembaga, unit kerja dan individu sangat diperlukan dan sejalan dengan kebijakan anggaran berbasis kinerja, namun secara nasional hingga saat ini belum ada kebijakan yang mendorong pengembangan manajemen kinerja tersebut. Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas, berinisiatif untuk mengembangkan dan menerapkan manajemen kinerja seperti dimaksud di atas.



## BAB II

### VISI, MISI DAN TUJUAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

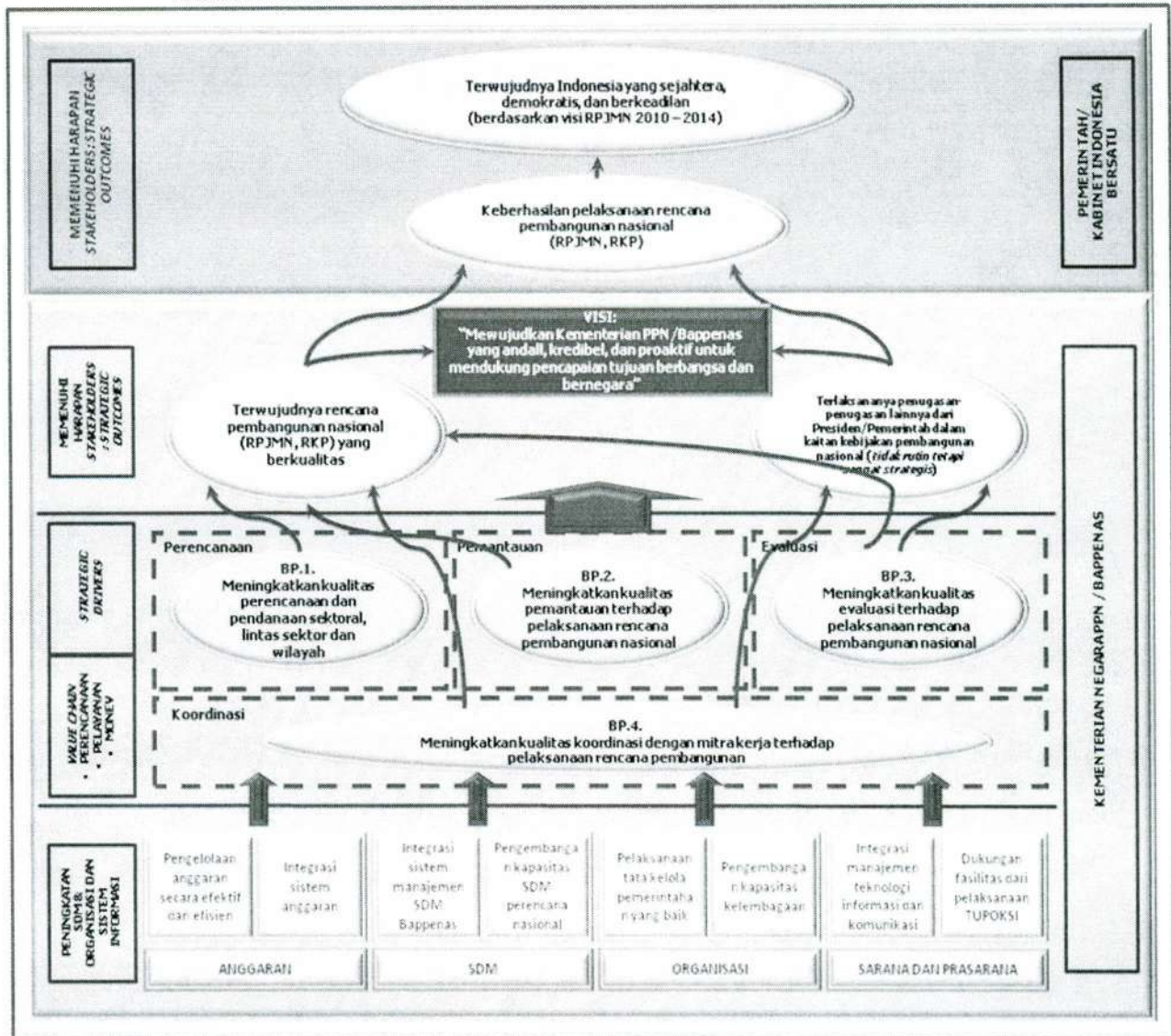
Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I, maka Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan nasional. Untuk itu, disusun visi dan misi Kementerian PPN/Bappenas yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukung sebagaimana tampak dalam *strategy map* pada Diagram 3. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMN 2010-2014.

Pada gambar tersebut, terlihat keterkaitan antara tujuan dan kegiatan Kementerian PPN/Bappenas dengan keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2010-2014 dan RKP, yang menjadi tanggung jawab semua kementerian/lembaga atau Kabinet Indonesia Bersatu II. Keterkaitan tersebut menunjukkan bahwa tujuan dan kegiatan Kementerian PPN/Bappenas harus diarahkan untuk dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2010-2014 dan RKP. Hal ini juga berlaku bagi kementerian/lembaga lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Ada 2 tujuan utama Kementerian PPN/Bappenas yaitu: terwujudnya rencana pembangunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas, dan terlaksananya penugasan-penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional. Kedua tujuan tersebut dicapai melalui 4 kegiatan utama (*business process*, *BP*) yaitu perencanaan dan pendanaan, pemantauan, evaluasi dan koordinasi; dan didukung dengan 4 faktor utama yaitu pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, organisasi, dan sarana dan prasarana kerja.

Diagram ...

Diagram 3  
PETA STRATEGI TAHUN 2010 - 2014  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS



## 2.1 Visi Kementerian PPN/Bappenas

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Kementerian PPN/Bappenas harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2010-2014 dan RKP, melalui penyusunan rencana pembangunan nasional (RPJMN, RKP) yang berkualitas dan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Presiden/Pemerintah.

Kualitas rencana pembangunan tersebut dilihat dari: 1) adanya tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur; 2) adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; 3) adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; serta 4) integrasi (keterkaitan) dan

konsistensi ...



konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan baik di tingkat pusat (Renstra/Renja Kementerian/Lembaga) maupun daerah (RPJMD/RKPD/ Renstra SKPD). Sedangkan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Presiden/Pemerintah dilihat dari sejauh mana tugas-tugas tersebut dimanfaatkan oleh Presiden/Pemerintah.

Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka berarti Kementerian PPN/Bappenas telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian, target, sasaran, misi dan visi RPJMN 2010-2014, dan selanjutnya mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sesuai amanat UUD 1945, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Oleh karena itu, Visi Kementerian PPN/Bappenas 2010-2014 adalah:

**"Mewujudkan Kementerian PPN/Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara"**

#### **Penjelasan Visi:**

Proses perencanaan pembangunan nasional harus melibatkan para pelaku pembangunan dan dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di berbagai bidang. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata andal, kredibel dan proaktif adalah sebagai berikut:

- Andal : Mampu melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi rencana pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan yang akan dicapai serta dapat diimplementasikan.
- Kredibel : Menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, yang meliputi antara lain transparansi, taat hukum, partisipatif, keterbukaan, dan akuntabilitas.
- Proaktif : Antisipatif dan aktif dalam turut menentukan arah tujuan berbangsa dan bernegara, serta mampu dengan cepat menyelesaikan dan atau memberikan kontribusi secara signifikan dalam penyelesaian permasalahan pembangunan nasional.

## 2.2. Misi Kementerian PPN/Bappenas

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan peran-peran Kementerian PPN/Bappenas, adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam rangka:
  - a. mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah;
  - b. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
  - c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
  - d. menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang.
3. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian PPN/Bappenas.

### Penjelasan Misi:

Misi merupakan langkah utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas. Karena itu, ada 3 (tiga) Misi atau langkah utama yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai Visi: "Mewujudkan Kementerian PPN/Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara". Kementerian PPN/Bappenas bertanggungjawab untuk menghasilkan rencana pembangunan nasional berdasarkan proses perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimulai dari daerah hingga tingkat nasional, melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan dalam rangka mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; serta menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Misi pertama ini sebagai bagian dari pelaksanaan peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai pengambil kebijakan (*policy maker*).

Agar ...



Agar penyusunan rencana dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana pembangunan yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja, tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang. Misi kedua ini merupakan pelaksanaan peran sebagai *think tank* yang strategis, mengingat hasil evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan, kajian, evaluasi kebijakan dan rekomendasinya dapat digunakan sebagai masukan strategis kepada Presiden, kementerian/lembaga ataupun pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan. Selain itu, hasil *think tank*, juga dapat menjadi masukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) dan tahunan (RKP). Jika peran sebagai *think tank* ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan meningkatkan citra (*brand image*) Kementerian PPN/Bappenas. Karena itu, peningkatan kualitas peran sebagai *think tank* merupakan bagian dari pembangunan citra lembaga (*organizational brand image building*).

Kemudian, agar semua tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan pelaksanaan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan mengenai peran sebagai *administrator*, melekat dalam semua kegiatan khususnya dalam rangka pengelolaan kegiatan dan dokumentasi negara (rencana pembangunan, dokumen pinjaman hibah luar negeri, dan sebagainya) secara akuntabel. Karena itu, tidak diletakkan sebagai misi.

### 2.3. Tujuan Kementerian PPN/Bappenas

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan peta strategi, sebagai berikut:

1. Terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas.
2. Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional.

Tujuan pertama adalah sesuai dengan tugas pokok Kementerian PPN/Bappenas di bidang perencanaan pembangunan. Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas diharapkan mampu menghasilkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas, baik berupa RPJMN maupun RKP. Sedangkan tujuan kedua, terkait

dengan ...



dengan tugas-tugas lain (penugasan khusus) yang diberikan Presiden atau Pemerintah kepada Kementerian PPN/Bappenas, misalnya dalam hal penanganan masalah-masalah yang memerlukan penanganan lintas instansi dan lintas sektor/bidang dengan skala besar, misalnya koordinasi penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana gempa dan tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias; serta penilaian terhadap perkiraan kerusakan dan kerugian (*damages and losses assessment*) yang diakibatkan oleh bencana gempa bumi Sumatera Barat, sekaligus menilai kebutuhan (*needs assessment*) pemulihan pasca bencana; koordinasi penanganan perubahan iklim (*climate change*), dan sebagainya.

Ukuran keberhasilan atau indikator kinerja untuk kedua tujuan tersebut di atas, dijelaskan dalam bagian Sasaran Strategis.

#### 2.4. Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam Peta Strategi (*Strategy Map*), “Keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2010-2014 dan RKP,” yang menjadi tanggung jawab semua kementerian/lembaga atau Kabinet Indonesia Bersatu II, sangat ditentukan oleh keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi tanggung jawab masing-masing kementerian dan lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2010-2014 dan RKP, diukur dari: a) persentase (%) pencapaian target/sasaran RPJMN 2010-2014; dan b) persentase (%) pencapaian target RKP setiap tahun pada periode RPJMN 2010-2014.

Dengan mengacu kepada ukuran atau indikator kinerja dari keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2010-2014 tersebut, maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan) yang juga menjadi sasaran strategis untuk kedua tujuan Kementerian PPN/Bappenas periode 2010-2014 adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran Strategis dari Tujuan Pertama: “Terwujudnya rencana pembangunan jangka menengah nasional dan tahunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas”, adalah:
  - 1) Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, yang diukur dari (indikator):
    - a) RPJMN 2010-2014 dan RKP tahun 2010 sampai dengan 2014 memiliki tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur;
    - b) % kesesuaian antara muatan rancangan RPJMN dengan RPJPN;
    - c) % kesesuaian antara muatan RPJMN dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih;
    - d) % kesesuaian antara muatan rancangan RKP dengan RPJMN;



- e) Renstra Kementerian/Lembaga memiliki tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur, serta sesuai dengan RPJMN 2010-2014;
  - f) Renja Kementerian/Lembaga memiliki tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur, serta sesuai dengan RKP.
- 2) Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap RPJMN 2010-2014, yang diukur dari:
- a) Pendapat *stakeholders* tentang proses penyusunan RPJMN.
  - b) Pendapat *stakeholders* tentang dokumen RPJMN yang telah ditetapkan.
- 3) Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap RKP, diukur dari:
- a) Pendapat *stakeholders* tentang proses penyusunan RKP.
  - b) Pendapat *stakeholders* tentang dokumen RKP yang telah ditetapkan.
- b. Sasaran Strategis dari tujuan kedua: “Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan dengan kebijakan pembangunan nasional”, adalah:
- Persentase (%) tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas (penugasan khusus) dari Pemerintah/Presiden.

### **BAB III**

#### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, ditetapkan arah kebijakan dan strategi Kementerian PPN/Bappenas, yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014.

#### **3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional**

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab I, arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang, seperti demokratisasi, desentralisasi, otonomi daerah, pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (*climate change*), ketegangan lintas-batas antarnegara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, RPJMN 2010-2014 menentukan 11 (sebelas) Prioritas Pembangunan Nasional, yaitu: 1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; 2) Pendidikan; 3) Kesehatan; 4) Penanggulangan Kemiskinan; 5) Ketahanan Pangan; 6) Infrastruktur; 7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha; 8) Energi; 9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; 10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Teluar dan Pasca Konflik; dan 11) Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi.

Selain kesebelas Program Prioritas tersebut, terdapat pula Prioritas Bidang Hukum dan Aparatur (Buku II RPJMN 2010-2014) yang menjadi acuan Renstra Kementerian PPN/Bappenas, yaitu Peningkatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan 4 (empat) fokus prioritas, sebagai berikut: 1) peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; 2) peningkatan kualitas pelayanan publik; 3) peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; dan 4) pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi. Prioritas dan keempat fokus prioritas tersebut mengandung makna perbaikan atau peningkatan kinerja.

Walaupun Kementerian PPN/Bappenas tidak ditunjuk sebagai penanggung jawab atau pelaksana dari kesebelas Program Prioritas Nasional dan Program 5 Tahun Kabinet Indonesia Bersatu II, namun Kementerian PPN/Bappenas berkewajiban mendukung pelaksanaan RPJMN dan Program 5 Tahun Kabinet Indonesia Bersatu II. Dukungan tersebut, harus tercemin dari kontribusi atau nilai pemanfaatan produk-produk Kementerian PPN/Bappenas, berupa: a) produk-produk perencanaan pembangunan (RPJMN, RKP) yang lebih berkualitas; b) hasil-



hasil pemantauan, evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, dan evaluasi kebijakan yang menjadi masukan bagi tindak lanjut perbaikan, proses perencanaan pembangunan, dan masukan bagi perumusan kebijakan pembangunan nasional; c) hasil-hasil pelaksanaan tugas lain (penugasan khusus) dari Presiden/Pemerintah.

Kemudian, Kementerian PPN/Bappenas sebagai instansi pemerintah juga berkewajiban menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam rangka peningkatan penyelenggaraan tugas dan fungsinya secara akuntabel, bersih dan bebas KKN, peningkatan kinerja lembaga dan pegawai, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas birokrasi. Penerapan tata kelola tersebut dilakukan melalui pemantapan reformasi birokrasi Kementerian PPN/Bappenas, yang sudah dilaksanakan secara bertahap dan intensif sejak tahun 2008.

Adapun arah kebijakan nasional yang menjadi acuan Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2010-2014 adalah sebagaimana yang tercantum dalam Buku II RPJMN 2010-2014 Bab XI Sistem Pendukung Manajemen Pembangunan Nasional, yaitu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih baik dari tahun ke tahun, sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian-bagian sebelumnya dalam Renstra ini. Karena itu, arah kebijakan tersebut menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan nasional dalam lima tahun ke depan, yaitu: “mewujudkan proses perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas baik jangka menengah maupun tahunan”. Dengan peningkatan kualitas proses perencanaan tersebut, maka diharapkan rencana pembangunan yang dihasilkan juga lebih baik atau lebih berkualitas, dalam arti: lebih jelas dan terukur dari tahun ke tahun; terdapat keterpaduan dan sinkronisasi yang lebih baik antar bidang, dan antara rencana pusat dengan rencana daerah.

Sebagai salah satu bagian atau fungsi dari manajemen pembangunan nasional, peningkatan kualitas perencanaan pembangunan tersebut harus terkait dengan fungsi-fungsi lainnya yaitu: sistem penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan bahkan pengawasannya. Keterkaitan ini sangat penting agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, akuntabel dan berhasil mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sejalan dengan amanat UU Nomor 17 Tahun 2003, perencanaan pembangunan harus didasarkan pada kebijakan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) agar dapat menjamin hubungan yang lebih jelas antara tujuan, sasaran, program, dan kegiatan instansi pemerintah serta memudahkan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengawasannya untuk melihat ukuran keberhasilan dan akuntabilitasnya.

Sedangkan strategi untuk melaksanakan kebijakan dan program di atas, selain disusun dengan mengacu kepada UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem



Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 2 ayat (4), juga dengan memperhatikan potensi dan permasalahan yang telah diuraikan dalam Bab Pendahuluan. Strategi tersebut adalah: a) mengkoordinasikan para pelaku pembangunan; b) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan c) melakukan berbagai upaya untuk: (1) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; (2) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; dan (3) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

### **3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian PPN/Bappenas**

Sesuai dengan visi, misi dan tujuan Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional diperlukan suatu rencana pembangunan yang berkualitas serta kebijakan pembangunan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, maka arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan dalam periode 2010-2014 adalah sebagai berikut :

Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan:

- 1) Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui penataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan nasional; serta peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
- 2) Penerapan perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran yang berbasis kinerja.
- 3) Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan.
- 4) Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan.
- 5) Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga dan pegawai.

Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal:

#### **Eksternal:**

- 1) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran sektoral, lintas sektoral dan wilayah, dan antara pusat dan daerah; serta keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- 2) Meningkatkan kualitas pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional.

3) Meningkatkan ...



- 3) Meningkatkan kualitas evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional.
- 4) Meningkatkan kualitas kajian dan atau evaluasi kebijakan pembangunan.
- 5) Meningkatkan kualitas koordinasi kebijakan pembangunan nasional.

**Internal:**

- 6) Membangun Manajemen Kinerja dari kinerja lembaga hingga kinerja individu/pegawai.
- 7) Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif, dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.
- 8) Meningkatkan kompetensi SDM di Kementerian PPN/Bappenas dan perencana di tingkat pusat dan daerah secara lebih proporsional dan akuntabel.
- 9) Melanjutkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Kementerian PPN/Bappenas.
- 10) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional tersebut, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan program-programnya sesuai RPJMN periode 2010-2014, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

- a. Program teknis  
Program Perencanaan Pembangunan Nasional.  
Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Kementerian PPN/Bappenas dalam proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan pembangunan.
- b. Program generik
  - 1) Program generik 1: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.
  - 2) Program generik 2: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
  - 3) Program generik 3: Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur.

Dalam Renstra periode sebelumnya (2005-2009), ada 5 (lima) program yang digunakan Kementerian PPN/Bappenas yaitu: 1) Program Penataan Kelembagaan dan Ketalaksanaan; 2) Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik; 3) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara; 4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara; dan 5) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur. Kelima program tersebut

merupakan ...

merupakan program generik yang juga digunakan oleh semua kementerian/lembaga baik seluruh program maupun sebagian dari kelima program tersebut. Karena bersifat generik (dapat digunakan semua kementerian/lembaga), maka kelima program tersebut tidak dapat mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), peran dan kewenangan Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, sehingga menyulitkan pengukuran kinerjanya.

Dibandingkan dengan program-program dalam Renstra 2005-2009, jumlah program dalam Renstra 2010-2014 lebih sedikit. Perbedaan lainnya ada pada substansi dan masalah kesesuaian dengan tupoksi Kementerian PPN/Bappenas. Program Perencanaan Pembangunan Nasional lebih sesuai dengan tupoksi Kementerian PPN/Bappenas, yang semula bernama Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan yang bersifat generik dan digunakan oleh semua kementerian/lembaga sehingga tidak sesuai atau tidak relevan untuk mengukur kinerja utama (tupoksi) masing-masing kementerian/lembaga. Sedangkan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, yang semula bernama Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik, adalah program generik yang dapat digunakan semua kementerian/lembaga. Cakupan substansi Program Dukungan Manajemen lebih fleksibel dan relevan untuk menampung kegiatan-kegiatan pendukung, termasuk gaji dan tunjangan pegawai.

Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan prioritas Kementerian PPN/Bappenas, sebagai berikut:

a. Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan Program Perencanaan Pembangunan Nasional:

- 1) Penyusunan rencana pembangunan nasional dan pendanaan/penganggarnya, baik antarwaktu, sektor, wilayah maupun antartingkat/fungsi pemerintahan.
- 2) Pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional.
- 3) Evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional, dan kajian serta evaluasi kebijakan pembangunan sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau perumusan kebijakan pembangunan.
- 4) Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan.
- 5) Koordinasi dalam melaksanakan perencanaan pembangunan nasional.

b. Kegiatan untuk melaksanakan ketiga program generik (pendukung):

- 1) Peningkatan kapasitas instansi/unit perencanaan di pusat dan di daerah.
- 2) Penyempurnaan ketatalaksanaan.
- 3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kementerian PPN/Bappenas dan aparatur perencana di instansi tingkat pusat dan daerah.

4) Peningkatan ...



- 4) Peningkatan fasilitas kerja, gedung, kantor, sarana dan prasarana kerja lainnya.
- 5) Pengawasan pelaksanaan kinerja dan anggaran Kementerian PPN/Bappenas.
- 6) Peningkatan kualitas kehumasan dalam rangka membangun citra positif lembaga (*brand image building*).
- 7) Peningkatan kualitas sistem data dan informasi perencanaan pembangunan.
- 8) Pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya.
- 9) Peningkatan intensitas kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi di pusat dan di daerah.

**Tabel 7**  
**Hubungan Visi, Misi, hingga Program dan Kegiatan 2010-2014 Kementerian PPN/Bappenas**

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
<b>Mewujudkan Kementerian PPN/ Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara"</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam rangka: <ol style="list-style-type: none"> <li>mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah;</li> <li>mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;</li> <li>mengoptimalkan partisipasi masyarakat;</li> <li>menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.</li> </ol> </li> <li>Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas.</li> <li>Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/ Pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, yang diukur dari (indikator): <ol style="list-style-type: none"> <li>RPJMN 2010-2014 dan RKP tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 memiliki tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur;</li> <li>% kesesuaian antara muatan rancangan RPJMN dengan RPJPN;</li> <li>% kesesuaian antara muatan RPJMN dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih;</li> <li>% kesesuaian antara muatan rancangan RKP dengan RPJMN</li> <li>Renstra Kementerian/Lembaga dan RPJM Daerah memiliki tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur serta sesuai dengan RPJMN</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui penataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan nasional; serta peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan.</li> <li>Penerapan perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran yang berbasis kinerja.</li> <li>Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan.</li> <li>Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan.</li> <li>Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja (<i>better performance</i>) lembaga dan pegawai.</li> </ol>	<p><b>A. Eksternal:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas perencanaan dan pendanaan sektoral, lintas sektoral dan wilayah;</li> <li>Meningkatkan kualitas pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional;</li> <li>Meningkatkan kualitas evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional;</li> <li>Meningkatkan kualitas kajian dan atau evaluasi kebijakan pembangunan sebagai masukan dalam rangka proses perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan pembangunan di berbagai bidang, dan atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMN 2010-2015 dan Program 5 Tahun Kabinet Indonesia Bersatu II.</li> <li>Meningkatkan kualitas koordinasi kebijakan pembangunan nasional;</li> </ol> <p><b>B. Internal:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Membangun Manajemen Kinerja: dari kinerja lembaga hingga kinerja individu/pegawai.</li> <li>Mengelola anggaran secara lebih efisien,</li> </ol>	<p><b>A. Program teknis</b> Program Perencanaan Pembangunan Nasional.</p> <p><b>B. Program generik</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Program Dukungan Manajemen.</li> <li>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.</li> <li>Program Peningkatan</li> </ol>	<p><b>A. Kegiatan-kegiatan utama dalam Program Perencanaan Pembangunan Nasional:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan rencana pembangunan nasional dan pendanaan/ penganggarnya antarwaktu, sektor, wilayah dan antartingkat/fungsi pemerintahan.</li> <li>Pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional.</li> <li>Evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional, dan kajian serta evaluasi kebijakan.</li> <li>Koordinasi dalam melaksanakan perencanaan pembangunan nasional.</li> </ol> <p><b>B. Kegiatan-kegiatan utama dalam ketiga program generik:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kapasitas kelembagaan,</li> <li>Penyempurnaan</li> </ol>



**Tabel 7**  
**Hubungan Visi, Misi, hingga Program dan Kegiatan 2010-2014 Kementerian PPN/Bappenas**

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
	<p>pelaksanaan rencana pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas, sebagai masukan untuk tindak lanjut perbaikan, proses perencanaan berikutnya dan untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang.</p> <p>3. Melakukan koordinasi yang efektif dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Kementerian PPN/Bappenas.</p>		<p>2010-2014;</p> <p>f. Renja Kementerian/ Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah memiliki tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur dan sesuai dengan RKP;</p> <p>2. Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) terhadap RPJMN - 2014, yang diukur dari:</p> <p>a. Pendapat <i>stakeholders</i> tentang proses penyusunan RPJMN.</p> <p>b. Pendapat <i>stakeholders</i> tentang dokumen RPJMN yang telah ditetapkan.</p> <p>3. Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) terhadap RKP), diukur dari:</p> <p>a. Pendapat <i>stakeholders</i> tentang proses penyusunan RKP;</p> <p>b. Pendapat <i>stakeholders</i> tentang dokumen RKP yang telah ditetapkan.</p>		<p>efektif, dan akuntabel.</p> <p>8. Meningkatkan kompetensi SDM di Bappenas dan perencana di tingkat pusat dan daerah secara lebih proporsional dan akuntabel.</p> <p>9. Melanjutkan penerapan prinsip-prinsip <i>good governance</i> di Kementerian Negara PPNBappenas.</p> <p>10. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.</p>	Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	<p>ketatalaksanaan,</p> <p>3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kementerian PPN/Bappenas dan aparatur perencana di instansi tingkat pusat dan daerah,</p> <p>4. Peningkatan fasilitas kerja, gedung, kantor, sarana dan prasarana kerja lainnya,</p> <p>5. Pengawasan pelaksanaan kinerja dan anggaran Kementerian PPN/Bappenas.</p> <p>6. Peningkatan kualitas kehumasan dalam rangka membangun citra positif lembaga (<i>brand image building</i>).</p> <p>7. Peningkatan kualitas sistem data dan informasi perencanaan pembangunan.</p> <p>8. Pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya.</p>

**Tabel 7**  
**Hubungan Visi, Misi, hingga Program dan Kegiatan 2010-2014 Kementerian PPN/Bappenas**

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
			4. Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan dengan kebijakan pembangunan nasional, diukur dari: - % tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas (penugasan khusus) dari Pemerintah/Presiden				



#### **BAB IV PENUTUP**

Renstra Kementerian PPN/Bappenas periode 2010-2014 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2010-2014 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Kementerian PPN/Bappenas. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2010-2014, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Kementerian PPN/Bappenas periode 2010-2014 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Kementerian PPN/Bappenas periode 2010-2014 yaitu meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada RPJMN 2010-2014.

Renstra Kementerian PPN/Bappenas periode 2010-2014 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

**ARMIDA S. ALISJAHBANA**

**ANAK LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR 1 TAHUN 2010**

KONTRAK KINERJA MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN PRESIDEN

INDIKATOR KINERJA	RENCANA AKSI	K/L TERKAIT	WAKTU	UNIT ESELON II
a. Memastikan tersusunnya Rencana Strategis Kementerian 2010-2014				
i. Menyusun usulan Rencana Strategis Kementerian 2010-2014 yang terdiri dari tahapan kerja, rencana aksi Kementerian, indikator kinerja utama, dan tenggat waktu			Paling lambat tanggal 20 November 2009	
ii. Menyempurnakan Rencana Strategis Kementerian 2010-2014 melalui koordinasi yang efektif dengan Menteri Keuangan			Paling lambat tanggal 31 Desember 2009	



KONTRAK KINERJA MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN PRESIDEN

INDIKATOR KINERJA	RENCANA AKSI	K/L TERKAIT	WAKTU	UNIT ESELON II
<p>b. Memastikan tercapainya target capaian Program 100 Hari</p> <p>i. Memastikan penetapan skema <i>co-financing</i> bagi program pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (penciptaan <i>ownership</i> di daerah) serta Pemerintah dan Swasta/BUMN (<i>Public Private Partnership</i>)</p> <p>ii. Meyempurnakan Keppres 80/2003 mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mencakup skema <i>co-financing</i> dan mengakomodasi tata cara pengadaan hasil industri kreatif, inovatif, budaya, dan hasil penelitian laboratorium atau institusi pendidikan sebelum Januari 2010</p>			<p>Paling lambat Januari 2010, kecuali dinyatakan secara spesifik pada program terkait</p>	

**KONTRAK KINERJA MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN PRESIDEN**

INDIKATOR KINERJA	RENCANA AKSI	K/L TERKAIT	WAKTU	UNIT ESELON II
<p><b>c. Memastikan tercapainya Prioritas Nasional, yang mencakup namun tidak terbatas pada:</b></p> <p>i. Merencanakan dengan seksama program pembangunan menuju tercapainya sasaran-sasaran nasional</p> <p>ii. Memastikan reformasi regulasi secara bertahap di tingkat nasional dan daerah sehingga terjadi harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tidak menimbulkan ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam implementasinya</p>			<p>Paling lambat Oktober 2014 kecuali dinyatakan secara spesifik pada program terkait</p>	
<p><b>d. Melaksanakan reformasi bidang pelayanan umum</b></p> <p>Mengkaji ulang dan mengusulkan perbaikan kebijakan, peraturan, dan proses pelaksanaan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan umum yang diberikan jajaran Kementerian secara tuntas sebelum Juni 2010 serta</p>			<p>Paling lambat Juni 2010</p>	



**KONTRAK KINERJA MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN PRESIDEN**

INDIKATOR KINERJA	RENCANA AKSI	K/L TERKAIT	WAKTU	UNIT ESELON II
memastikan efektivitas implementasi perbaikan peraturan tersebut sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk Presiden untuk memimpin reformasi pelayanan umum				
<b>e. Melaksanakan perbaikan peraturan yang mendukung investasi</b>  Mengkaji dan mengusulkan perbaikan peraturan-peraturan yang menghambat dan berpotensi menghambat investasi sebelum Juni 2010 dan memastikan efektivitas perbaikan peraturan tersebut sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan			Paling lambat Juni 2010	
<b>f. Melakukan penyempurnaan kebijakan dan peraturan subsidi</b>  Mengkaji dan mengusulkan penyempurnaan kebijakan dan peraturan mengenai subsidi BBM, listrik, dan pupuk sebelum Juni 2010 dan memastikan efektivitas peraturan yang disempurnakan			Paling lambat Juni 2010	

**KONTRAK KINERJA MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN PRESIDEN**

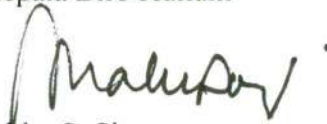
INDIKATOR KINERJA	RENCANA AKSI	K/L TERKAIT	WAKTU	UNIT ESELON II
tersebut sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan				
g. Mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis Kementerian 2010-2014			Sesuai target waktu dalam Rencana Strategis kementerian 2010-2014	
h. Pengelolaan keuangan Kementerian memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI			Mempertahankan WTP	

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

**ARMIDA S. ALISJAHBANA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum

  
Delthy S. Simatupang



**ANAK LAMPIRAN II**  
**PERATURAN MENTERI PPN/**  
**KEPALA BAPPENAS**  
**NOMOR 1 TAHUN 2010**

Formulir 1

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Program</b>	<b>Outcome</b>							
Program Perencanaan Pembangunan Nasional	1. Terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas 2. Terlaksananya penugasan-penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional	1. RPJMN 2010-2014 dan RKP tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 memiliki tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur	100%	-	-	-	100%	Kementerian PPN/Bappenas
		2. % kesesuaian antara muatan rancangan RPJMN dengan RPJPN	100%	-	-	-	100%	
		3. % kesesuaian antara muatan RPJMN dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih	100%	-	-	-	100%	
		4. % kesesuaian antara muatan rancangan RKP dengan RPJMN	100%	100%	100%	100%	100%	
		5. % kesesuaian rancangan Renstra KL dengan target/sasaran dalam rancangan RPJMN	100%	-	-	-	-	
		6. % kesesuaian rancangan Renja KL dengan target/sasaran dalam rancangan RKP	100%	100%	100%	100%	100%	
		7. Pendapat <i>stakeholders</i> tentang proses penyusunan RPJMN	-	-	-	-	baik	
		8. Pendapat <i>stakeholders</i> tentang dokumen RPJMN yang telah ditetapkan	-	-	-	-	baik	
		9. Pendapat <i>stakeholders</i> tentang proses penyusunan RKP	cukup baik	cukup baik	cukup baik	cukup baik	baik	
		10. Pendapat <i>stakeholders</i> tentang dokumen RKP yang telah ditetapkan	cukup baik	cukup baik	cukup baik	cukup baik	baik	
		11. % tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas (penugasan khusus) dari Pemerintah/Presiden	70%	75%	80%	85%	90%	

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**


PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Program</b>	<b>Outcome</b>							
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas	Terlaksananya dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tupoksi Kementerian PPN/Bappenas	1. % pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian PPN/Bappenas melalui penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia	50%	80%	90%	100%	100%	
		2. Tingkat kepuasan stakeholder terhadap pelayanan Kementerian PPN/Bappenas	cukup	baik	baik	baik	baik	
		3. % fasilitasi dan pembinaan di bidang perencanaan pembangunan nasional dengan mitra kerja, baik di pusat maupun daerah	cukup	baik	baik	baik	baik	
<b>Program</b>	<b>Outcome</b>							
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Kementerian PPN/Bappenas	1. % ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PPN/Bappenas	100%	100%	100%	100%	100%	
		2. Terlaksananya pembangunan gedung baru Bappenas	10%	100%	-	-	-	
<b>Program</b>	<b>Outcome</b>							
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas	Meningkatnya akuntabilitas dan pengawasan aparatur Kementerian PPN/Bappenas	1. Opini WTP dari BPK	baik	baik	baik	baik	baik	
		2. Standar penilaian <i>good governance</i>	cukup	baik	baik	baik	baik	
		3. Standar penilaian AKIP	cukup	baik	baik	baik	baik	

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

**ARMIDA S. ALISJAHBANA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum

  
 Delthy S. Simatupang



**ANAK LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR 1 TAHUN 2010**

Formulir 1

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretariat Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Program</b>	<b>Outcome</b>							
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas	Meningkatnya pelaksanaan tugas manajemen kelembagaan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	1. % pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian PPN/Bappenas melalui penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia (mencakup semua bidang di bawah Sesmen dan Inspektorat)	50%	100%	-	-	-	Sekretariat Kementerian PPN/ Sekretariat Utama Bappenas
		2. Tingkat kepuasan pelayanan internal Kementerian PPN/Bappenas	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
		3. % jumlah aparatur perencana pusat dan daerah yang mengikuti diklat perencana	85%	85%	85%	85%	85%	
		4. Ketepatan waktu penyelesaian dokumen kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas (LAKIP, Renstra, Renja, DIPA, administrasi kepegawaian: kenaikan pangkat, pensiun, dll)	100%	100%	100%	100%	100%	
		5. % peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan nasional (baik melalui e-planning, e-monev, intranet, website)	80%	85%	90%	90%	100%	
		6. Tersedianya sistem penegakan disiplin yang efektif	-	-	-	-	100%	
		7. % pelanggaran disiplin mendapatkan sanksi	-	-	-	-	100%	

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretariat Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		8. % pejabat telah menandatangani dan melaksanakan pakta integritas	-	-	-	-	100%	
		9. % pejabat yang telah melaporkan LHKPN	-	-	-	-	100%	
		10. % pengadaan menggunakan e-procurement	-	-	-	-	75%	
		11. % tersusunnya struktur kelembagaan (organisasi dan tata kerja) yang proporsional, efektif, efisien)	-	-	-	-	100%	
		12. % SOP utama telah tersusun sesuai dengan proses bisnis yang lebih sederhana	-	-	-	-	100%	
		13. Tersedianya sistem rekrutmen yang transparan	-	-	-	-	100%	
		14. Tersedianya sistem penilaian kinerja yang terukur	-	-	-	-	100%	
		15. Tersedianya sistem promosi dan mutasi yang terbuka dan transparan	-	-	-	-	100%	
		16. Tersedianya sistem diklat berbasis merit dan kompetensi	-	-	-	-	100%	
		17. Tersedianya sistem penegakan kode etik yang efektif, disertai penerapan <i>reward and punishment</i>	-	-	-	-	100%	
		18. Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur	-	-	-	-	100%	
		19. Manajemen kearsipan dan dokumentasi sudah dilaksanakan dengan sistem berbasis TIK	-	-	-	-	100%	
		20. % penerapan SAKIP (renstra, penilaian kinerja, kontrak kinerja, pengendalian, dll)	-	-	-	-	100%	
		21. Opini BPK atas LK K/L	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Kementerian PPN/Bappenas	1. % ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PPN/Bappenas	100%	100%	100%	100%	100%	
		2. Terlaksananya pembangunan gedung baru Bappenas	10%	100%	-	-	-	



**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Program</b>	<b>Outcome</b>							
Program Perencanaan Pembangunan Nasional	Meningkatnya kualitas rancangan rencana pembangunan dan pendanaan nasional terkait lingkup sumber daya manusia dan kebudayaan	1. % kesesuaian antara muatan rancangan RPJMN terkait lingkup sumber daya manusia dan kebudayaan dengan RPJPN	100%	-	-	-	100%	Kedeputan Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan
		2. % kesesuaian antara muatan rancangan RPJMN terkait lingkup sumber daya manusia dan kebudayaan dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih	100%	-	-	-	100%	
		3. % kesesuaian antara muatan rancangan RPJMN terkait lingkup sumber daya manusia dan kebudayaan dengan lingkup lainnya dalam RPJMN	100%	-	-	-	100%	
		4. Rancangan RPJMN terkait lingkup sumber daya manusia dan kebudayaan memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	100%	-	-	-	100%	
		5. % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup sumber daya manusia dan kebudayaan dengan RPJMN	100%	100%	100%	100%	100%	
		6. % kesesuaian antara muatan rancangan RKP terkait lingkup sumber daya manusia dan kebudayaan dengan lingkup lainnya dalam RKP	100%	100%	100%	100%	100%	
		7. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup sumber daya manusia dan kebudayaan: - RPJMN - RKP	- 100%	- 100%	100% 100%	- 100%	100% 100%	

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		8. % program atau kegiatan dalam RKP dan RPJMN tahun berjalan terkait lingkup sumber daya manusia dan kebudayaan yang dipantau: - RPJMN - RKP	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	
		9. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup sumber daya manusia dan kebudayaan	100%	100%	100%	100%	100%	
		10. % kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkup sumber daya manusia dan kebudayaan dengan target/sasaran dalam rancangan RPJMN	100%	-	-	-	-	
		11. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup sumber daya manusia dan kebudayaan dengan RKP dan pagu indikatif	100%	100%	100%	100%	100%	



**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Program</b>	<b>Outcome</b>							Kedeputan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan
Program Perencanaan Pembangunan Nasional	Meningkatnya kualitas rancangan rencana pembangunan dan pendanaan nasional terkait lingkup politik, hukum, pertahanan, dan keamanan	1. % kesesuaian antara muatan rancangan RPJMN terkait lingkup politik, hukum, pertahanan, dan keamanan dengan RPJPN	100%	-	-	-	100%	
		2. % kesesuaian antara muatan rancangan RPJMN terkait lingkup politik, hukum, pertahanan, dan keamanan dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih	100%	-	-	-	100%	
		3. % kesesuaian antara muatan rancangan RPJMN terkait lingkup politik, hukum, pertahanan, dan keamanan dengan lingkup lainnya dalam RPJMN	100%	-	-	-	100%	
		4. Rancangan RPJMN terkait lingkup politik, hukum, pertahanan, dan keamanan memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	100%	-	-	-	100%	
		5. % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup politik, hukum, pertahanan, dan keamanan dengan RPJMN	100%	100%	100%	100%	100%	
		6. % kesesuaian antara muatan rancangan RKP terkait lingkup politik, hukum, pertahanan, dan keamanan dengan lingkup lainnya dalam RKP	100%	100%	100%	100%	100%	
		7. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup politik, hukum, pertahanan, dan keamanan: - RPJMN - RKP	- 100%	- 100%	100% 100%	- 100%	100% 100%	

## Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		8. % program atau kegiatan dalam RKP dan RPJMN tahun berjalan terkait lingkup politik, hukum, pertahanan, dan keamanan yang dipantau: - RPJMN - RKP	- 100%	- 100%	100% 100%	- 100%	100% 100%	
		9. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup politik, hukum, pertahanan, dan keamanan	100%	100%	100%	100%	100%	
		10. % kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkup politik, hukum, pertahanan, dan keamanan dengan target/sasaran dalam rancangan RPJMN	100%	-	-	-	-	
		11. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup politik, hukum, pertahanan, dan keamanan dengan RKP dan pagu indikatif	100%	100%	100%	100%	100%	



**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Program</b>	<b>Outcome</b>							
Program Perencanaan Pembangunan Nasional	Meningkatnya kualitas rancangan rencana pembangunan dan pendanaan nasional terkait lingkup kemiskinan, ketenagakerjaan, dan usaha kecil menengah	1. % kesesuaian antara muatan rancangan RPJMN terkait lingkup kemiskinan, ketenagakerjaan, dan usaha kecil menengah dengan RPJPN	100%	-	-	-	100%	Kedeputan Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah
		2. % kesesuaian antara muatan rancangan RPJMN terkait lingkup kemiskinan, ketenagakerjaan, dan usaha kecil menengah dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih	100%	-	-	-	100%	
		3. % kesesuaian antara muatan rancangan RPJMN terkait lingkup kemiskinan, ketenagakerjaan, dan usaha kecil menengah dengan lingkup lainnya dalam RPJMN	100%	-	-	-	100%	
		4. Rancangan RPJMN terkait lingkup kemiskinan, ketenagakerjaan, dan usaha kecil menengah memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	100%	-	-	-	100%	
		5. % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup kemiskinan, ketenagakerjaan, dan usaha kecil menengah dengan RPJMN	100%	100%	100%	100%	100%	
		6. % kesesuaian antara muatan rancangan RKP terkait lingkup kemiskinan, ketenagakerjaan, dan usaha kecil menengah dengan lingkup lainnya dalam RKP	100%	100%	100%	100%	100%	
		7. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup kemiskinan, ketenagakerjaan, dan usaha kecil menengah: - RPJMN - RKP	- 100%	- 100%	100% 100%	- 100%	100% 100%	

**Unit Kerja Eselon I: Kedeputian Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah**

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		8. % program atau kegiatan dalam RKP dan RPJMN tahun berjalan terkait lingkup kemiskinan, ketenagakerjaan, dan usaha kecil menengah yang dipantau: - RPJMN - RKP	30% 30%	40% 40%	50% 50%	60% 60%	60% 60%	
		9. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup kemiskinan, ketenagakerjaan, dan usaha kecil menengah	100%	100%	100%	100%	100%	
		10. % kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkup kemiskinan, ketenagakerjaan, dan usaha kecil menengah dengan target/sasaran dalam rancangan RPJMN	100%	-	-	-	-	
		11. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup kemiskinan, ketenagakerjaan, dan usaha kecil menengah dengan RKP dan pagu indikatif	100%	100%	100%	100%	100%	



**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Ekonomi

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Program</b>	<b>Outcome</b>							Kedeputan Bidang Ekonomi
Program Perencanaan Pembangunan Nasional	Meningkatnya kualitas rancangan rencana pembangunan dan pendanaan nasional terkait lingkup ekonomi	1. % kesesuaian antara muatan rancangan RPJMN terkait lingkup ekonomi dengan RPJPN	100%	-	-	-	100%	
		2. % kesesuaian antara muatan rancangan RPJMN terkait lingkup ekonomi dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih	100%	-	-	-	100%	
		3. % kesesuaian antara muatan rancangan RPJMN terkait lingkup ekonomi dengan lingkup lainnya dalam RPJMN	100%	-	-	-	100%	
		4. Rancangan RPJMN terkait lingkup ekonomi memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	100%	-	-	-	100%	
		5. % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup ekonomi dengan RPJMN	100%	100%	100%	100%	100%	
		6. % kesesuaian antara muatan rancangan RKP terkait lingkup ekonomi dengan lingkup lainnya dalam RKP	100%	100%	100%	100%	100%	
		7. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup ekonomi: - RPJMN - RKP	- 100%	- 100%	100% 100%	- 100%	100% 100%	
		8. % program atau kegiatan dalam RKP dan RPJMN tahun berjalan terkait lingkup ekonomi yang dipantau: - RPJMN - RKP	- 100%	- 100%	100% 100%	- 100%	100% 100%	
		9. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup ekonomi	100%	100%	100%	100%	100%	

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Ekonomi

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		10. % kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkup ekonomi dengan target/sasaran dalam rancangan RPJMN	100%	-	-	-	-	
		11. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup ekonomi dengan RKP dan pagu indikatif	100%	100%	100%	100%	100%	



**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Program</b>	<b>Outcome</b>							
Program Perencanaan Pembangunan Nasional	Meningkatnya kualitas rancangan rencana pembangunan dan pendanaan nasional terkait lingkup sumber daya alam dan lingkungan hidup	1. % kesesuaian antara muatan rancangan RPJMN terkait lingkup sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan RPJPN	100%	-	-	-	100%	Kedeputan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
		2. % kesesuaian antara muatan rancangan RPJMN terkait lingkup sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih	100%	-	-	-	100%	
		3. % kesesuaian antara muatan rancangan RPJMN terkait lingkup sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan lingkup lainnya dalam RPJMN	100%	-	-	-	100%	
		4. Rancangan RPJMN terkait lingkup sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	100%	-	-	-	100%	
		5. % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan RPJMN	100%	100%	100%	100%	100%	
		6. % kesesuaian antara muatan rancangan RKP terkait lingkup sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan lingkup lainnya dalam RKP	100%	100%	100%	100%	100%	
		7. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup sumber daya alam dan lingkungan hidup: - RPJMN - RKP	- 100%	- 100%	100% 100%	- 100%	100% 100%	

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		8. % program atau kegiatan dalam RKP dan RPJMN tahun berjalan terkait lingkup sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dipantau: - RPJMN - RKP	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	
		9. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup sumber daya alam dan lingkungan hidup	100%	100%	100%	100%	100%	
		10. % kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkup sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan target/sasaran dalam rancangan RPJMN	100%	-	-	-	-	
		11. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan RKP dan pagu indikatif	100%	100%	100%	100%	100%	



**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Sarana dan Prasarana

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Program</b>	<b>Outcome</b>							Kedeputan Bidang Sarana dan Prasarana
Program Perencanaan Pembangunan Nasional	Meningkatnya kualitas rancangan rencana pembangunan dan pendanaan nasional terkait lingkup sarana dan prasarana	1. % kesesuaian antara muatan rancangan RPJMN terkait lingkup sarana dan prasarana dengan RPJPN	100%	-	-	-	100%	
		2. % kesesuaian antara muatan rancangan RPJMN terkait lingkup sarana dan prasarana dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih	100%	-	-	-	100%	
		3. % kesesuaian antara muatan rancangan RPJMN terkait lingkup sarana dan prasarana dengan lingkup lainnya dalam RPJMN	100%	-	-	-	100%	
		4. Rancangan RPJMN terkait lingkup sarana dan prasarana memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	100%	-	-	-	100%	
		5. % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup sarana dan prasarana dengan RPJMN	100%	100%	100%	100%	100%	
		6. % kesesuaian antara muatan rancangan RKP terkait lingkup sarana dan prasarana dengan lingkup lainnya dalam RKP	100%	100%	100%	100%	100%	
		7. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup sarana dan prasarana: - RPJMN - RKP	- 100%	- 100%	100% 100%	- 100%	100% 100%	
		8. % program atau kegiatan dalam RKP dan RPJMN tahun berjalan terkait lingkup sarana dan prasarana yang dipantau: - RPJMN - RKP	- 100%	- 100%	100% 100%	- 100%	100% 100%	

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Sarana dan Prasarana

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		9. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup sarana dan prasarana	100%	100%	100%	100%	100%	
		10. % kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkup sarana dan prasarana dengan target/sasaran dalam rancangan RPJMN	100%	-	-	-	-	
		11. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup sarana dan prasarana dengan RKP dan pagu indikatif	100%	100%	100%	100%	100%	



**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Program</b>	<b>Outcome</b>							
Program Perencanaan Pembangunan Nasional	Meningkatnya kualitas rancangan rencana pembangunan dan pendanaan nasional terkait lingkup pengembangan regional dan otonomi daerah	1. % kesesuaian antara muatan rancangan RPJMN terkait lingkup pengembangan regional dan otonomi daerah dengan RPJPN	100%	-	-	-	100%	Kedeputan Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah
		2. % kesesuaian antara muatan rancangan RPJMN terkait lingkup pengembangan regional dan otonomi daerah dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih	100%	-	-	-	100%	
		3. % kesesuaian antara muatan rancangan RPJMN terkait lingkup pengembangan regional dan otonomi daerah dengan lingkup lainnya dalam RPJMN	100%	-	-	-	100%	
		4. Rancangan RPJMN terkait lingkup pengembangan regional dan otonomi daerah memiliki sasaran dan indikator yang terukur	100%	-	-	-	100%	
		5. % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup pengembangan regional dan otonomi daerah dengan RPJMN	100%	100%	100%	100%	100%	
		6. % kesesuaian antara muatan rancangan RKP terkait lingkup pengembangan regional dan otonomi daerah dengan lingkup lainnya dalam RKP	100%	100%	100%	100%	100%	
		7. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup pengembangan regional dan otonomi daerah: - RPJMN - RKP	- 100%	- 100%	100% 100%	- 100%	100% 100%	

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		8. % program atau kegiatan dalam RKP dan RPJMN tahun berjalan terkait lingkup pengembangan regional dan otonomi daerah yang dapat dipantau: - RPJMN - RKP	- 100%	- 100%	100% 100%	- 100%	100% 100%	
		9. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup pengembangan regional dan otonomi daerah	100%	100%	100%	100%	100%	
		10. % kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkup pengembangan regional dan otonomi daerah dengan target/sasaran dalam rancangan RPJMN	100%	-	-	-	-	
		11. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup pengembangan regional dan otonomi daerah dengan RKP dan pagu indikatif	100%	100%	100%	100%	100%	



**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Pendanaan Pembangunan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Program</b>	<b>Outcome</b>							Kedeputan Bidang Pendanaan Pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan Nasional	Meningkatnya kualitas rancangan rencana pendanaan pembangunan nasional	1. % kesesuaian muatan rancangan rencana pendanaan pembangunan nasional dalam rancangan RPJMN dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih	100%	-	-	-	100%	
		2. Rancangan rencana pendanaan pembangunan nasional dalam rancangan RPJMN memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	80%	-	-	-	100%	
		3. Rancangan rencana pendanaan pembangunan nasional dalam rancangan RKP memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	80%	90%	100%	100%	100%	
		4. % kesesuaian muatan rancangan rencana pendanaan pembangunan nasional dalam rancangan RKP dengan pendanaan dalam RPJMN	100%	100%	100%	100%	100%	
		5. Jumlah dokumen rancangan rencana pendanaan pembangunan nasional	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	
		6. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pendanaan pembangunan: - RPJMN - RKP	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	
		7. % program atau kegiatan dalam RKP dan RPJMN tahun berjalan terkait lingkup pendanaan pembangunan yang dipantau: - RPJMN - RKP	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Pendanaan Pembangunan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		8. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup pendanaan pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	
		9. % ketepatan waktu penyelesaian laporan koordinasi pelaksanaan rencana pendanaan pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	



## Unit Kerja Eselon I: Kedeputian Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Program</b>	<b>Outcome</b>							
Program Perencanaan Pembangunan Nasional	Meningkatnya kualitas evaluasi kinerja pembangunan nasional	1. % kesesuaian struktur rancangan dokumen rencana pembangunan lima tahunan /RPJMN (kebijakan prioritas) dengan standar/pedoman yang ditetapkan 2. % hasil evaluasi pembangunan terhadap rancangan dokumen pembangunan lima tahunan (RPJMN) sesuai rencana 3. % hasil evaluasi pembangunan terhadap rancangan dokumen pembangunan tahunan (RKP) sesuai rencana 4. % pemantauan atas pelaksanaan kebijakan prioritas dalam RKP sesuai dengan rencana 5. % kesesuaian pelaksanaan kebijakan prioritas dalam RKP dengan rencana 6. % kesesuaian pelaksanaan kebijakan prioritas dalam RPJMN dengan rencana 7. % kesesuaian pelaksanaan evaluasi kebijakan program prioritas tertentu (tematik) dibandingkan dengan rencana 8. % pengembangan sistem evaluasi kinerja pembangunan nasional (buku pedoman RPJMN, Renstra K/L, Renja K/L, manual pengukuran kinerja, indikator kinerja pembangunan nasional, manual pelaksanaan monev) 9. % kesesuaian kinerja pembangunan daerah terhadap pencapaian prioritas nasional dikaitkan dengan transfer pusat-daerah 10. % intensitas pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi ke dalam proses perencanaan dan penganggaran	-	-	-	-	100%	Kedeputan Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan
			100%	-	-	-	-	
			-	100%	100%	100%	100%	
			100%	100%	100%	100%	100%	
			100%	100%	100%	100%	100%	
			-	-	100%	-	100%	
			100%	100%	100%	100%	100%	
			75%	80%	100%	100%	100%	
			100%	100%	100%	100%	100%	
			100%	100%	100%	100%	100%	

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		11. % koordinasi pengembangan sistem evaluasi dan pelaporan kinerja pembangunan nasional sesuai rencana	100%	100%	100%	100%	100%	



**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Inspektorat Utama

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Program</b>	<b>Outcome</b>							Inspektorat Utama
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas	Meningkatnya efektivitas SPIP di Kementerian PPN/ Bappenas	1. Tingkat efektivitas SPIP di Kementerian PPN/ Bappenas	5	5	6	6	7	
		2. Tingkat kepuasan internal di bidang pengawasan	60%	65%	70%	75%	80%	
		3. Jumlah LHP yang disampaikan ke Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas	9	9	9	9	9	
		4. Tersedianya sistem pelaporan gratifikasi	-	-	-	-	100%	
		5. Tersedia dan terlaksananya sistem pengendalian internal yang efektif	-	-	-	-	100%	
		6. % temuan yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	100%	
		7. Opini BPK atas LK K/L	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
		8. % unit pelayanan publik yang menerapkan manajemen pengaduan yang efektif	-	-	-	-	100%	
		9. % penerapan SAKIP (renstra, penilaian kinerja, kontrak kinerja, pengendalian, dll)	-	-	-	-	100%	

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Kegiatan</b>	<b>Output</b>							
Kegiatan penyusunan perencanaan kebijakan pembangunan berupa kajian/telaahan	Dokumen hasil telaahan sesuai bidangnya.	% hasil telaahan yang dimanfaatkan oleh Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas dan unit kerja lainnya, serta pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan isu	100%	100%	100%	100%	100%	Staf Ahli Menteri PPN/Kepala Bappenas

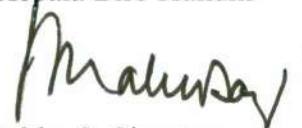
**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

**ARMIDA S. ALISJAHBANA**

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum



Delthy S. Simatupang



**ANAK LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR 1 TAHUN 2010**

### Formulir 1

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretariat Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

[illegible]

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretariat Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Kegiatan</b>	<b>Output</b>							
Kegiatan penyusunan kebijakan dan pelayanan kepegawaian	Dokumen pelaksanaan penyusunan kebijakan dan pelayanan kepegawaian	1. % pencapaian target perencanaan SDM dan mutasi	90%	95%	100%	100%	100%	Biro Sumber Daya Manusia
		2. % pencapaian target pengembangan SDM	85%	90%	94%	95%	96%	
		3. % pencapaian target hasil pengelolaan jabatan fungsional	90%	95%	96%	100%	100%	
		4. Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan SDM	32 dokumen	32 dokumen	32 dokumen	36 dokumen	36 dokumen	
		5. % pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian PPN/Bappenas melalui penataan manajemen sumber daya manusia	60%	80%	90%	95%	100%	
		6. Tersedianya sistem penegakan disiplin yang efektif	-	-	-	-	100%	
		7. % pelanggaran disiplin mendapatkan sanksi	-	-	-	-	100%	
		8. % pejabat telah menandatangani dan melaksanakan pakta integritas	-	-	-	-	100%	
		9. % pejabat yang telah melaporkan LHKPN	-	-	-	-	100%	
		10. Tersedianya sistem rekrutmen yang transparan	-	-	-	-	100%	
		11. Tersedianya sistem penilaian kinerja yang terukur	-	-	-	-	100%	
		12. Tersedianya sistem promosi dan mutasi yang terbuka dan transparan	-	-	-	-	100%	
		13. Tersedianya sistem diklat berbasis merit dan kompetensi	-	-	-	-	100%	
		14. Tersedianya sistem penegakan kode etik yang efektif, disertai penerapan <i>reward and punishment</i>	-	-	-	-	100%	
		15. % penerapan SAKIP (renstra, penilaian kinerja, kontrak kinerja, pengendalian, dll)	-	-	-	-	100%	

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretariat Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Kegiatan</b>	<b>Output</b>							Biro Hukum
Kegiatan pembinaan dan pelayanan hukum	Dokumen pelaksanaan pelayanan hukum, meliputi peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, serta pengembangan dan informasi hukum	1. % penyelesaian kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, serta pengembangan dan informasi hukum	100%	100%	100%	100%	100%	
		2. Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, serta pengembangan dan informasi hukum	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	
		3. Ketepatan waktu penyelesaian dalam mendukung pelayanan penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, serta pengembangan dan informasi hukum	90%	95%	100%	100%	100%	



**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretariat Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Kegiatan</b>	<b>Output</b>							
Kegiatan penyusunan perencanaan, analisis organisasi, dan tata laksana	Dokumen hasil pelaksanaan di bidang perencanaan, organisasi, dan tata laksana	1. % pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian PPN/Bappenas melalui penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan	80%	100%	-	-	-	Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana
		2. % jumlah kontrak kinerja tahunan unit kerja eselon I dan II Kementerian PPN/Bappenas	100%	100%	100%	100%	100%	
		3. % kesesuaian kegiatan unit-unit kerja eselon I dan II dengan tupoksinya	100%	100%	100%	100%	100%	
		4. % kesesuaian RKA Kementerian PPN/Bappenas dengan pagu indikatif pemerintah	100%	100%	100%	100%	100%	
		5. Ketepatan waktu penyelesaian pelaksanaan perencanaan, organisasi, dan tata laksana	100%	100%	100%	100%	100%	
		6. Rata-rata ketepatan waktu penyampaian laporan kegiatan dan anggaran	100%	100%	100%	100%	100%	
		7. Jumlah dokumen hasil pelaksanaan di bidang perencanaan, kelembagaan, dan ketatalaksanaan:						
		- Perencanaan (Renstra, Renja, RKAKL, DIPA)	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	
		- Monev (Laporan monev, laporan PP 39, laporan PP 8, laporan Inpres 5, LAKIP)	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	
		- Kelembagaan (peraturan organisasi, laporan evaluasi)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
		- Ketatalaksanaan (SOP, baik PERMEN maupun manual pelaksanaan, termasuk aplikasi komputer)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
		- Kerjasama Perencanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Sekretariat Kementerian Pembangunan Nasional/Sekretariat Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		8. % tersusunnya struktur kelembagaan (organisasi dan tata kerja) yang proporsional, efektif, efisien)	-	-	-	-	100%	
		9. % SOP utama telah tersusun sesuai dengan proses bisnis yang lebih sederhana	-	-	-	-	100%	
		10. % penerapan SAKIP (renstra, penilaian kinerja, kontrak kinerja, pengendalian, dll)	-	-	-	-	100%	

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretariat Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Kegiatan</b>	<b>Output</b>							Biro Umum
Kegiatan pelayanan umum dan keuangan	Dokumen pelaksanaan pelayanan umum yang mencakup: pengelolaan perlengkapan dan tata usaha, urusan dalam, verifikasi anggaran, dan administrasi keuangan	1. Tingkat kepuasan internal terhadap pelayanan umum	100%	100%	100%	100%	100%	
		2. % penyelesaian kegiatan pengelolaan perlengkapan dan tata usaha, urusan dalam, verifikasi anggaran, dan administrasi keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	
		3. Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan tata usaha, urusan dalam, verifikasi anggaran, dan administrasi keuangan	23 Dokumen	23 Dokumen	23 Dokumen	23 Dokumen	23 Dokumen	
		4. Ketepatan waktu penyelesaian dalam mendukung pelayanan pengelolaan perlengkapan dan tata usaha, urusan dalam, verifikasi anggaran, dan administrasi keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	
		5. % pengadaan menggunakan e-procurement	-	-	-	-	75%	
		6. Opini BPK atas LK K/L	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
Kegiatan peningkatan fasilitas pelayanan umum dan operasional	Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai	% ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PPN/Bappenas	100%	100%	100%	100%	100%	



Unit Kerja Eselon I: Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretariat Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kegiatan	Output							Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana
Kegiatan pembinaan perencana dan penyelenggaraan diklat perencanaan	Dokumen hasil pelaksanaan pembinaan perencana dan penyelenggaraan diklat perencana	1. % kesesuaian hasil kajian diklat dan JFP yang digunakan dalam perumusan kebijakan diklat dan JFP	85%	85%	90%	90%	95%	
		2. % target hasil seleksi yang tercapai	80%	85%	85%	90%	90%	
		3. % peserta diklat yang telah diseleksi sesuai dengan tupoksi	85%	85%	85%	90%	90%	
		4. % target penempatan yang tercapai	85%	85%	85%	90%	90%	
		5. % jumlah peserta yang dimonitor berhasil dalam menyelesaikan studi	80%	85%	85%	90%	90%	
		6. % kegiatan akreditasi dan penilaian yang dilaksanakan	90%	90%	90%	95%	95%	
		7. Dokumen hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan perencana dan penyelenggaraan diklat perencanaan	4 jenis dokumen	4 jenis dokumen	4 jenis dokumen	4 jenis dokumen	4 jenis dokumen	

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretariat Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Kegiatan</b>	<b>Output</b>							Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Kegiatan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan nasional	Dokumen pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan nasional	1. % tingkat kemapanan prasarana TI (diukur dari kapasitas dan ketersediaan)	90%	91%	92%	93%	94%	
		2. % tingkat implementasi aplikasi sesuai dengan kebutuhan (pengembangan dan evaluasi)	80%	80%	80%	80%	80%	
		3. % tingkat ketersediaan dan penyajian data dan informasi (kualitas data/informasi yang tersedia dan penyajian)	81%	83%	86%	86%	86%	
		4. % tingkat ketersediaan bahan kepustakaan dan berfungsinya kearsipan (tersedianya bahan pustaka dan pedoman kearsipan)	80%	86%	89%	90%	95%	
		5. Tersusunnya rencana penerapan <i>e-government</i> yang konkrit dan terukur	-	-	-	-	100%	
		6. Manajemen kearsipan dan dokumentasi sudah dilaksanakan dengan sistem berbasis TIK	-	-	-	-	100%	

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Kegiatan</b>	<b>Output</b>							
Perencanaan pembangunan nasional terkait lingkup kesehatan dan gizi masyarakat	Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup kesehatan dan gizi masyarakat	1. % kesesuaian muatan rancangan RPJMN terkait lingkup kesehatan dan gizi masyarakat dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih	100%	-	-	-	100%	Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat
		2. Rancangan RPJMN terkait lingkup kesehatan dan gizi masyarakat memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	100%	-	-	-	100%	
		3. % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup kesehatan dan gizi masyarakat dengan RPJMN	100%	100%	100%	100%	100%	
		4. Rancangan RKP terkait lingkup kesehatan dan gizi masyarakat memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	
		5. Jumlah dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup kesehatan dan gizi masyarakat: - RPJMN - RKP	1 dokumen 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	
		6. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup kesehatan dan gizi masyarakat: - RPJMN - RKP	- 100%	- 100%	100% 100%	- 100%	100% 100%	



**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		7. % program atau kegiatan dalam RKP dan RPJMN tahun berjalan terkait lingkup kesehatan dan gizi masyarakat yang dipantau: - RPJMN - RKP	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	
		8. Jumlah laporan pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup kesehatan dan gizi masyarakat secara berkala sesuai yang direncanakan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	
		9. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup kesehatan dan gizi masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	
		10. Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup kesehatan dan gizi masyarakat	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	
		11. % kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkup kesehatan dan gizi masyarakat dengan target/sasaran dalam rancangan RPJMN	100%	-	-	-	-	
		12. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup kesehatan dan gizi masyarakat dengan RKP dan pagu indikatif	100%	100%	100%	100%	100%	
		13. Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan rencana pembangunan nasional (termasuk substansi rencana dan pembiayaannya/rupee murni dan PHLN) terkait lingkup kesehatan dan gizi masyarakat	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	

## Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kegiatan	Output							Direktorat Agama dan Pendidikan
Perencanaan pembangunan nasional terkait lingkup agama dan pendidikan	Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup agama dan pendidikan	1. % kesesuaian muatan rancangan RPJMN terkait lingkup agama dan pendidikan dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih	100%	-	-	-	100%	
		2. Rancangan RPJMN terkait lingkup agama dan pendidikan memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	100%	-	-	-	100%	
		3. % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup agama dan pendidikan dengan RPJMN	100%	100%	100%	100%	100%	
		4. Rancangan RKP terkait lingkup agama dan pendidikan memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	
		5. Jumlah dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup agama dan pendidikan: - RPJMN - RKP	1 dokumen 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	
		6. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup agama dan pendidikan: - RPJMN - RKP	- 100%	- 100%	100% 100%	- 100%	100% 100%	
		7. % program atau kegiatan dalam RKP dan RPJMN tahun berjalan terkait lingkup agama dan pendidikan yang dipantau: - RPJMN - RKP	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		8. Jumlah laporan pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup agama dan pendidikan secara berkala sesuai yang direncanakan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	
		9. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup agama dan pendidikan	100%	100%	100%	100%	100%	
		10. Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup agama dan pendidikan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	
		11. % kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkup agama dan pendidikan dengan target/sasaran dalam rancangan RPJMN	100%	-	-	-	-	
		12. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup agama dan pendidikan dengan RKP dan pagu indikatif	100%	100%	100%	100%	100%	
		13. Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan rencana pembangunan nasional (termasuk substansi rencana dan pembiayaannya/rupee murni dan PHLN) terkait lingkup agama dan pendidikan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	



**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Kegiatan</b>	<b>Output</b>							
Perencanaan pembangunan nasional terkait lingkup kependudukan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup kependudukan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	1. % kesesuaian muatan rancangan RPJMN terkait lingkup kependudukan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih	100%	-	-	-	100%	Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
		2. Rancangan RPJMN terkait lingkup kependudukan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	100%	-	-	-	100%	
		3. % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup kependudukan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak dengan RPJMN	100%	100%	100%	100%	100%	
		4. Rancangan RKP terkait lingkup kependudukan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	
		5. Jumlah dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup kependudukan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak: - RPJMN - RKP	1 dokumen 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		6. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup kependudukan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak: - RPJMN - RKP	- 100%	- 100%	100% 100%	- 100%	100% 100%	
		7. % program atau kegiatan dalam RKP dan RPJMN tahun berjalan terkait lingkup kependudukan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang dipantau: - RPJMN - RKP	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	
		8. Jumlah laporan pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup kependudukan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak secara berkala sesuai yang direncanakan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	
		9. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup kependudukan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	100%	100%	100%	100%	100%	
		10. Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup kependudukan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		11. % kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkup kependudukan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak dengan target/sasaran dalam rancangan RPJMN	100%	-	-	-	-	
		12. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup kependudukan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak dengan RKP dan pagu indikatif	100%	100%	100%	100%	100%	
		13. Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan rencana pembangunan nasional (termasuk substansi rencana dan pembiayaannya/rupee mumi dan PHLN) terkait lingkup kependudukan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	



**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Kegiatan</b>	<b>Output</b>							
Perencanaan pembangunan nasional terkait lingkup kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olahraga	Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olahraga	1. % kesesuaian muatan rancangan RPJMN terkait lingkup kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olahraga dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih	100%	-	-	-	100%	Direktorat Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
		2. Rancangan RPJMN terkait lingkup kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olahraga memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	100%	-	-	-	100%	
		3. % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olahraga dengan RPJMN	100%	100%	100%	100%	100%	
		4. Rancangan RKP terkait lingkup kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olahraga memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	
		5. Jumlah dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olahraga: - RPJMN - RKP	1 dokumen 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	
		6. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olahraga: - RPJMN - RKP	- 100%	- 100%	100% 100%	- 100%	100% 100%	

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		7. % program atau kegiatan mitra kerja dalam RKP dan RPJMN tahun berjalan terkait lingkup kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olahraga yang dipantau: - RPJMN - RKP	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	
		8. Jumlah laporan pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olahraga secara berkala sesuai yang direncanakan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	
		9. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olahraga	100%	100%	100%	100%	100%	
		10. Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olahraga	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	
		11. % kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkup kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olahraga dengan target/sasaran dalam rancangan RPJMN	100%	-	-	-	-	
		12. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olahraga dengan RKP dan pagu indikatif	100%	100%	100%	100%	100%	

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		13. Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan rencana pembangunan nasional (termasuk substansi rencana dan pembiayaannya/rupee mumi dan PHLN) terkait lingkup kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olahraga	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	



**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Kegiatan</b>	<b>Output</b>							
Perencanaan pembangunan nasional terkait lingkup politik dan komunikasi	Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup politik dan komunikasi	1. % kesesuaian muatan rancangan RPJMN terkait lingkup politik dan komunikasi dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih	100%	-	-	-	100%	Direktorat Politik dan Komunikasi
		2. Rancangan RPJMN terkait lingkup politik dan komunikasi memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	90%	-	-	-	100%	
		3. % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup politik dan komunikasi dengan RPJMN	70%	100%	100%	100%	100%	
		4. Rancangan RKP terkait lingkup politik dan komunikasi memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	70%	100%	100%	100%	100%	
		5. Jumlah dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup politik dan komunikasi: - RPJMN - RKP	1 dokumen 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	
		6. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup politik dan komunikasi: - RPJMN - RKP	- 100%	- 100%	100% 100%	- 100%	100% 100%	
		7. % program atau kegiatan dalam RKP dan RPJMN tahun berjalan terkait lingkup politik dan komunikasi yang dipantau: - RPJMN - RKP	90% 90%	95% 95%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		8. Jumlah laporan pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup politik dan komunikasi secara berkala sesuai yang direncanakan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	
		9. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup politik dan komunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	
		10. Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup politik dan komunikasi	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	
		11. % kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkup politik dan komunikasi dengan target/sasaran dalam rancangan RPJMN	100%	-	-	-	-	
		12. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup politik dan komunikasi dengan RKP dan pagu indikatif	70%	100%	100%	100%	100%	
		13. Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan rencana pembangunan nasional (termasuk substansi rencana dan pembiayaannya/rupee murni dan PHLN) terkait lingkup politik dan komunikasi	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Kegiatan</b>	<b>Output</b>							Direktorat Aparatur Negara
Perencanaan pembangunan nasional terkait lingkup aparatur negara	Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup aparatur negara	1. % kesesuaian muatan rancangan RPJMN terkait lingkup aparatur negara dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih	100%	-	-	-	100%	
		2. Rancangan RPJMN terkait lingkup aparatur negara memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	100%	-	-	-	100%	
		3. % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup aparatur negara dengan RPJMN	100%	100%	100%	100%	100%	
		4. Rancangan RKP terkait lingkup aparatur negara memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	
		5. Jumlah dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup aparatur negara: - RPJMN - RKP	1 dokumen 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	
		6. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup aparatur negara: - RPJMN - RKP	- 100%	- 100%	100% 100%	- 100%	100% 100%	
		7. % program atau kegiatan dalam RKP dan RPJMN tahun berjalan terkait lingkup aparatur negara yang dipantau: - RPJMN - RKP	- 100%	- 100%	100% 100%	- 100%	100% 100%	
		8. Jumlah laporan pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup aparatur negara secara berkala sesuai yang direncanakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	



**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		9. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup aparatur negara	100%	100%	100%	100%	100%	
		10. Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup aparatur negara	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
		11. % kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkup aparatur negara dengan target/sasaran dalam rancangan RPJMN	100%	-	-	-	-	
		12. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup aparatur negara dengan RKP dan pagu indikatif	100%	100%	100%	100%	100%	
		13. Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan rencana pembangunan nasional (termasuk substansi rencana dan pembiayaannya/rupiah mumi dan PHLN) terkait lingkup aparatur negara	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kegiatan	Output							Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia
Perencanaan pembangunan nasional terkait lingkup hukum dan hak asasi manusia	Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup hukum dan hak asasi manusia	1. % kesesuaian muatan rancangan RPJMN terkait lingkup hukum dan hak asasi manusia dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih	100%	-	-	-	100%	
		2. Rancangan RPJMN terkait lingkup hukum dan hak asasi manusia memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	100%	-	-	-	100%	
		3. % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup hukum dan hak asasi manusia dengan RPJMN	100%	100%	100%	100%	100%	
		4. Rancangan RKP terkait lingkup hukum dan hak asasi manusia memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	
		5. Jumlah dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup hukum dan hak asasi manusia: - RPJMN - RKP	1 dokumen 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	
		6. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup hukum dan hak asasi manusia: - RPJMN - RKP	- 100%	- 100%	100% 100%	- 100%	100% 100%	
		7. % program atau kegiatan dalam RKP dan RPJMN tahun berjalan terkait lingkup hukum dan hak asasi manusia yang dipantau: - RPJMN - RKP	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		8. Jumlah laporan pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup hukum dan hak asasi manusia secara berkala sesuai yang direncanakan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
		9. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup hukum dan hak asasi manusia	100%	100%	100%	100%	100%	
		10. Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup hukum dan hak asasi manusia	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
		11. % kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkup hukum dan hak asasi manusia dengan target/sasaran dalam rancangan RPJMN	100%	-	-	-	-	
		12. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup hukum dan hak asasi manusia dengan RKP dan pagu indikatif	100%	100%	100%	100%	100%	
		13. Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan rencana pembangunan nasional (termasuk substansi rencana dan pembiayaannya/rupee murni dan PHLN) terkait lingkup hukum dan hak asasi manusia	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	



Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

[illegible]

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Kegiatan</b>	<b>Output</b>							
Perencanaan pembangunan nasional terkait lingkup pertahanan dan keamanan	Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup pertahanan dan keamanan	1. % kesesuaian muatan rancangan RPJMN terkait lingkup pertahanan dan keamanan dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih	100%	-	-	-	100%	Direktorat Pertahanan dan Keamanan
		2. Rancangan RPJMN terkait lingkup pertahanan dan keamanan memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	100%	-	-	-	100%	
		3. % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup pertahanan dan keamanan dengan RPJMN	100%	100%	100%	100%	100%	
		4. Rancangan RKP terkait lingkup pertahanan dan keamanan memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	
		5. Jumlah dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup pertahanan dan keamanan: - RPJMN - RKP	1 dokumen 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	
		6. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup pertahanan dan keamanan: - RPJMN - RKP	- 100%	- 100%	100% 100%	- 100%	100% 100%	

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		7. % program atau kegiatan mitra kerja dalam RKP dan RPJMN tahun berjalan terkait lingkup pertahanan dan keamanan yang dipantau: - RPJMN - RKP	- 100%	- 100%	100% 100%	- 100%	- 100%	
		8. Jumlah laporan pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup pertahanan dan keamanan secara berkala sesuai yang direncanakan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
		9. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup pertahanan dan keamanan	100%	100%	100%	100%	100%	
		10. Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup pertahanan dan keamanan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
		11. % kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkup pertahanan dan keamanan dengan target/sasaran dalam rancangan RPJMN	100%	-	-	-	-	
		12. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup pertahanan dan keamanan dengan RKP dan pagu indikatif	100%	100%	100%	100%	100%	
		13. Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan rencana pembangunan nasional (termasuk substansi rencana dan pembiayaannya/rupee mumi dan PHLN) terkait lingkup pertahanan dan keamanan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	



**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Kegiatan</b>	<b>Output</b>							
Perencanaan pembangunan nasional terkait lingkup penanggulangan kemiskinan	Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup penanggulangan kemiskinan	1. % kesesuaian muatan rancangan RPJMN terkait lingkup penanggulangan kemiskinan dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih	100%	-	-	-	100%	Direktorat Penanggulangan Kemiskinan
		2. Rancangan RPJMN terkait lingkup penanggulangan kemiskinan memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	100%	-	-	-	100%	
		3. % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup penanggulangan kemiskinan dengan RPJMN	100%	100%	100%	100%	100%	
		4. Rancangan RKP terkait lingkup penanggulangan kemiskinan memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	
		5. Jumlah dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup penanggulangan kemiskinan: - RPJMN - RKP	1 dokumen 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	
		6. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup penanggulangan kemiskinan: - RPJMN - RKP	- 100%	- 100%	100% 100%	- 100%	100% 100%	
		7. % program atau kegiatan dalam RKP dan RPJMN tahun berjalan terkait lingkup penanggulangan kemiskinan yang dipantau: - RPJMN - RKP	- 40%	- 40%	60% 60%	- 75%	75% 75%	

**Unit Kerja Eselon I: Kedeputian Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah**

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		8. Jumlah laporan pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup penanggulangan kemiskinan secara berkala sesuai yang direncanakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
		9. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup penanggulangan kemiskinan	100%	100%	100%	100%	100%	
		10. Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup penanggulangan kemiskinan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
		11. % kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkup penanggulangan kemiskinan dengan target/sasaran dalam rancangan RPJMN	-	-	-	-	-	
		12. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup penanggulangan kemiskinan dengan RKP dan pagu indikatif	100%	100%	100%	100%	100%	
		13. Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan rencana pembangunan nasional (termasuk substansi rencana dan pembiayaannya/rupee murni dan PHLN) terkait lingkup penanggulangan kemiskinan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Kegiatan</b>	<b>Output</b>							
Perencanaan pembangunan nasional terkait lingkup tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja	Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja	1. % kesesuaian muatan rancangan RPJMN terkait lingkup tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih	100%	-	-	-	100%	Direktorat Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja
		2. Rancangan RPJMN terkait lingkup tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	100%	-	-	-	100%	
		3. % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja dengan RPJMN	100%	100%	100%	100%	100%	
		4. Rancangan RKP terkait lingkup tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	
		5. Jumlah dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja: - RPJMN - RKP	1 dokumen 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	
		6. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja: - RPJMN - RKP	- 100%	- 100%	100% 100%	- 100%	100% 100%	



**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		7. % program atau kegiatan dalam RKP dan RPJMN tahun berjalan terkait lingkup tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja yang dipantau: - RPJMN - RKP	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	
		8. Jumlah laporan pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja secara berkala sesuai yang direncanakan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
		9. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja	100%	100%	100%	100%	100%	
		10. Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	
		11. % kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkup tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja dengan target/sasaran dalam rancangan RPJMN	100%	-	-	-	-	
		12. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja dengan RKP dan pagu indikatif	100%	100%	100%	100%	100%	

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputian Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		13. Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan rencana pembangunan nasional (termasuk substansi rencana dan pembiayaannya/rupee mumi dan PHLN) terkait lingkup tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	7 dokumen	

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Kegiatan</b>	<b>Output</b>							
Perencanaan pembangunan nasional terkait lingkup pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah	Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah	1. % kesesuaian muatan rancangan RPJMN terkait lingkup pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih	100%	-	-	-	100%	Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		2. Rancangan RPJMN terkait lingkup pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	100%	-	-	-	100%	
		3. % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah dengan RPJMN	100%	100%	100%	100%	100%	
		4. Rancangan RKP terkait lingkup pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	
		5. Jumlah dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah: - RPJMN - RKP	1 dokumen 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	
		6. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah: - RPJMN - RKP	- 100%	- 100%	100% 100%	- 100%	100% 100%	



**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		7. % program atau kegiatan dalam RKP dan RPJMN tahun berjalan terkait lingkup pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah yang dipantau: - RPJMN - RKP	80% 80%	85% 85%	90% 90%	95% 95%	100% 100%	
		8. Jumlah laporan pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah secara berkala sesuai yang direncanakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
		9. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah	100%	100%	100%	100%	100%	
		10. Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
		11. % kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkup pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah dengan target/sasaran dalam rancangan RPJMN	100%	-	-	-	-	
		12. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah dengan RKP dan pagu indikatif	100%	100%	100%	100%	100%	

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		13. Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan rencana pembangunan nasional (termasuk substansi rencana dan pembiayaannya/rupee mumi dan PHLN) terkait lingkup pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Kegiatan</b>	<b>Output</b>							Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat
Perencanaan pembangunan nasional terkait lingkup perlindungan dan kesejahteraan masyarakat	Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup perlindungan dan kesejahteraan masyarakat	1. % kesesuaian muatan rancangan RPJMN terkait lingkup perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih	100%	-	-	-	100%	
		2. Rancangan RPJMN terkait lingkup perlindungan dan kesejahteraan masyarakat memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	100%	-	-	-	100%	
		3. % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dengan RPJMN	100%	100%	100%	100%	100%	
		4. Rancangan RKP terkait lingkup perlindungan dan kesejahteraan masyarakat memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	
		5. Jumlah dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup perlindungan dan kesejahteraan masyarakat: - RPJMN - RKP	1 dokumen 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	
		6. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup perlindungan dan kesejahteraan masyarakat: - RPJMN - RKP	- 100%	- 100%	100% 100%	- 100%	100% 100%	



**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		7. % program atau kegiatan mitra kerja dalam RKP dan RPJMN tahun berjalan terkait lingkup perlindungan dan kesejahteraan masyarakat yang dipantau: - RPJMN - RKP	100% 100%	- -	- -	- -	100% 100%	
		8. Jumlah laporan pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup perlindungan dan kesejahteraan masyarakat secara berkala sesuai yang direncanakan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
		9. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup perlindungan dan kesejahteraan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	
		10. Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup perlindungan dan kesejahteraan masyarakat	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
		11. % kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkup perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dengan target/sasaran dalam rancangan RPJMN	100%	-	-	-	-	
		12. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dengan RKP dan pagu indikatif	100%	100%	100%	100%	100%	

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		13. Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan rencana pembangunan nasional (termasuk substansi rencana dan pembiayaannya/rupee murni dan PHLN) terkait lingkup perlindungan dan kesejahteraan masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Ekonomi

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Kegiatan</b>	<b>Output</b>							Direktorat Perencanaan Makro
Perencanaan pembangunan nasional terkait lingkup perencanaan makro	Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup perencanaan makro	1. % kesesuaian muatan rancangan RPJMN terkait lingkup perencanaan makro dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih	100%	-	-	-	100%	
		2. Rancangan RPJMN terkait lingkup perencanaan makro memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	100%	-	-	-	100%	
		3. % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup perencanaan makro dengan RPJMN yang sesuai atau mencerminkan kondisi yang akan dihadapi	100%	100%	100%	100%	100%	
		4. Rancangan RKP terkait lingkup perencanaan makro memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	
		5. Jumlah dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup perencanaan makro yang berkualitas: - RPJMN - RKP	1 dokumen 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	
		6. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup perencanaan makro: - RPJMN - RKP	- 100%	- 100%	100% 100%	- 100%	100% 100%	
		7. % program atau kegiatan dalam RKP dan RPJMN tahun berjalan mitra kerja yang dipantau	100%	100%	100%	100%	100%	



## Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Ekonomi

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		8. Jumlah laporan pemantauan yang berkualitas atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup perencanaan makro secara berkala sesuai yang direncanakan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
		9. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup perencanaan makro	100%	100%	100%	100%	100%	
		10. Jumlah laporan hasil evaluasi yang berkualitas pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup perencanaan makro	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
		11. % kesesuaian rancangan Renstra KL mitra kerja dengan target/sasaran dalam rancangan RPJMN	100%	-	-	-	-	
		12. % kesesuaian Renja KL mitra kerja dengan RKP dan pagu indikatif	100%	100%	100%	100%	100%	
		13. Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan rencana pembangunan nasional ( <i>termasuk substansi rencana dan pembiayaannya/rupee mumi dan PHLN</i> ) mitra kerja	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Ekonomi

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Kegiatan</b>	<b>Output</b>							Direktorat Keuangan Negara
Perencanaan pembangunan nasional terkait lingkup keuangan negara	Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup keuangan negara	1. % kesesuaian muatan rancangan RPJMN terkait lingkup keuangan negara dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih	100%	-	-	-	100%	
		2. Rancangan RPJMN terkait lingkup keuangan negara memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	100%	-	-	-	100%	
		3. % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup keuangan negara dengan RPJMN	100%	100%	100%	100%	100%	
		4. Rancangan RKP terkait lingkup keuangan negara memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	
		5. Jumlah dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup keuangan negara: - RPJMN - RKP	1 dokumen 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	
		6. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup keuangan negara: - RPJMN - RKP	- 100%	- 100%	100% 100%	- 100%	100% 100%	
		7. % program atau kegiatan dalam RKP dan RPJMN tahun berjalan terkait lingkup keuangan negara yang dipantau: - RPJMN - RKP	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Ekonomi

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		8. Jumlah laporan pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup keuangan negara secara berkala sesuai yang direncanakan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
		9. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup keuangan negara	100%	100%	100%	100%	100%	
		10. Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup keuangan negara	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
		11. % kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkup keuangan negara dengan target/sasaran dalam rancangan RPJMN	100%	-	-	-	-	
		12. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup keuangan negara dengan RKP dan pagu indikatif	100%	100%	100%	100%	100%	
		13. Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan rencana pembangunan nasional (termasuk substansi rencana dan pembiayaannya/rupee murni dan PHLN) terkait lingkup keuangan Negara	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	



**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Ekonomi

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Kegiatan</b>	<b>Output</b>							
Perencanaan pembangunan nasional terkait lingkup jasa keuangan dan analisis moneter	Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup jasa keuangan dan analisis moneter	1. % kesesuaian muatan rancangan RPJMN terkait lingkup jasa keuangan dan analisis moneter dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih	100%	-	-	-	100%	Direktorat Jasa Keuangan dan Analisis Moneter
		2. Rancangan RPJMN terkait lingkup jasa keuangan dan analisis moneter memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	100%	-	-	-	100%	
		3. % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup jasa keuangan dan analisis moneter dengan RPJMN	100%	100%	100%	100%	100%	
		4. Rancangan RKP terkait lingkup jasa keuangan dan analisis moneter memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	
		5. Jumlah dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup jasa keuangan dan analisis moneter: - RPJMN - RKP	1 dokumen 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	
		6. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup jasa keuangan dan analisis moneter: - RPJMN - RKP	- 100%	- 100%	100% 100%	- 100%	100% 100%	

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Ekonomi

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		7. % program atau kegiatan prioritas nasional dari mitra kerja dalam RKP dan RPJMN tahun berjalan terkait lingkup jasa keuangan dan analisis moneter yang dipantau: - RPJMN - RKP	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	
		8. Jumlah laporan pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup jasa keuangan dan analisis moneter secara berkala sesuai yang direncanakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
		9. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup jasa keuangan dan analisis moneter	100%	100%	100%	100%	100%	
		10. Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup jasa keuangan dan analisis moneter	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
		11. % kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkup jasa keuangan dan analisis moneter dengan target/sasaran dalam rancangan RPJMN	100%	-	-	-	-	
		12. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup jasa keuangan dan analisis moneter dengan RKP dan pagu indikatif	100%	100%	100%	100%	100%	

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputian Bidang Ekonomi

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		13. Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan rencana pembangunan nasional (termasuk substansi rencana dan pembiayaannya/rupee mumi dan PHLN) terkait lingkup jasa keuangan dan analisis moneter	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	



**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Ekonomi

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Kegiatan</b>	<b>Output</b>							
Perencanaan pembangunan nasional terkait lingkup perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi internasional	Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi internasional	1. % kesesuaian muatan rancangan RPJMN terkait lingkup perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi internasional dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih	100%	-	-	-	100%	Direktorat Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional
		2. Rancangan RPJMN terkait lingkup perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi internasional memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	100%	-	-	-	100%	
		3. % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi internasional dengan RPJMN	100%	100%	100%	100%	100%	
		4. Rancangan RKP terkait lingkup perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi internasional memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	
		5. Jumlah dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi internasional: - RPJMN - RKP	1 dokumen 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	
		6. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi internasional: - RPJMN - RKP	- 100%	- 100%	100% 100%	- 100%	100% 100%	

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Ekonomi

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		7. % program atau kegiatan prioritas nasional mitra kerja dalam RKP dan RPJMN tahun berjalan terkait lingkup perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi internasional yang dipantau: - RPJMN - RKP	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	
		8. Jumlah laporan pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi internasional secara berkala sesuai yang direncanakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
		9. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi internasional	100%	100%	100%	100%	100%	
		10. Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi internasional	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
		11. % kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkup perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi internasional dengan target/sasaran dalam rancangan RPJMN	100%	-	-	-	-	
		12. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi internasional dengan RKP dan pagu indikatif	100%	100%	100%	100%	100%	

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Ekonomi

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		13. Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan rencana pembangunan nasional ( <i>termasuk substansi rencana dan pembiayaannya/rupee murni dan PHLN</i> ) terkait lingkup perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi internasional	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	



**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Ekonomi

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Kegiatan</b>	<b>Output</b>							
Perencanaan pembangunan nasional terkait lingkup industri, IPTEK, dan BUMN	Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup industri, IPTEK, dan BUMN	1. % kesesuaian muatan rancangan RPJMN terkait lingkup industri, IPTEK, dan BUMN dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih	100%	-	-	-	100%	Direktorat Industri, IPTEK, dan BUMN
		2. Rancangan RPJMN terkait lingkup industri, IPTEK, dan BUMN memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	100%	-	-	-	100%	
		3. % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup industri, IPTEK, dan BUMN dengan RPJMN	100%	100%	100%	100%	100%	
		4. Rancangan RKP terkait lingkup industri, IPTEK, dan BUMN memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	
		5. Jumlah dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup industri, IPTEK, dan BUMN: - RPJMN - RKP	1 dokumen 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	
		6. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup industri, IPTEK, dan BUMN: - RPJMN - RKP	- 100%	- 100%	100% 100%	- 100%	100% 100%	

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Ekonomi

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		7. % program atau kegiatan prioritas nasional mitra kerja dalam RKP dan RPJMN tahun berjalan terkait lingkup industri, IPTEK, dan BUMN yang dipantau: - RPJMN - RKP	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	
		8. Jumlah laporan pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup industri, IPTEK, dan BUMN secara berkala sesuai yang direncanakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
		9. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup industri, IPTEK, dan BUMN	100%	100%	100%	100%	100%	
		10. Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup industri, IPTEK, dan BUMN	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
		11. % kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkup industri, IPTEK, dan BUMN dengan target/sasaran dalam rancangan RPJMN	100%	-	-	-	-	
		12. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup industri, IPTEK, dan BUMN dengan RKP dan pagu indikatif	100%	100%	100%	100%	100%	
		13. Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan rencana pembangunan nasional ( <i>termasuk substansi rencana dan pembiayaannya/rupee mumi dan PHLN</i> ) terkait lingkup industri, IPTEK, dan BUMN	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	

## Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Kegiatan</b>	<b>Output</b>							Direktorat Pangan dan Pertanian
Perencanaan pembangunan nasional terkait lingkup pangan dan pertanian	Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup pangan dan pertanian	1. % kesesuaian muatan rancangan RPJMN terkait lingkup pangan dan pertanian dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih	100%	-	-	-	100%	
		2. Rancangan RPJMN terkait lingkup pangan dan pertanian memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	100%	-	-	-	100%	
		3. % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup pangan dan pertanian dengan RPJMN	100%	100%	100%	100%	100%	
		4. Rancangan RKP terkait lingkup pangan dan pertanian memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	
		5. Jumlah dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup pangan dan pertanian: - RPJMN - RKP	1 dokumen 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	
		6. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup pangan dan pertanian: - RPJMN - RKP	- 100%	- 100%	100% 100%	- 100%	100% 100%	
		7. % program atau kegiatan dalam RKP dan RPJMN tahun berjalan terkait lingkup pangan dan pertanian yang dipantau: - RPJMN - RKP	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	



**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		8. Jumlah laporan pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup pangan dan pertanian secara berkala sesuai yang direncanakan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
		9. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup pangan dan pertanian	100%	100%	100%	100%	100%	
		10. Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup pangan dan pertanian	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
		11. % kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkup pangan dan pertanian dengan target/sasaran dalam rancangan RPJMN	100%	-	-	-	-	
		12. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup pangan dan pertanian dengan RKP dan pagu indikatif	100%	100%	100%	100%	100%	
		13. Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan rencana pembangunan nasional ( <i>termasuk substansi rencana dan pembiayaannya/rupee mumi dan PHLN</i> ) terkait lingkup pangan dan pertanian	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Kegiatan</b>	<b>Output</b>							
Perencanaan pembangunan nasional terkait lingkup kehutanan dan konservasi sumber daya air	Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup kehutanan dan konservasi sumber daya air	1. % kesesuaian muatan rancangan RPJMN terkait lingkup kehutanan dan konservasi sumber daya air dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih	100%	-	-	-	100%	Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air
		2. Rancangan RPJMN terkait lingkup kehutanan dan konservasi sumber daya air memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	100%	-	-	-	100%	
		3. % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup kehutanan dan konservasi sumber daya air dengan RPJMN	100%	100%	100%	100%	100%	
		4. Rancangan RKP terkait lingkup kehutanan dan konservasi sumber daya air memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	
		5. Jumlah dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup kehutanan dan konservasi sumber daya air: - RPJMN - RKP	1 dokumen 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	
		6. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup kehutanan dan konservasi sumber daya air: - RPJMN - RKP	- 100%	- 100%	100% 100%	- 100%	100% 100%	

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		7. % program atau kegiatan dalam RKP dan RPJMN tahun berjalan terkait lingkup kehutanan dan konservasi sumber daya air yang dipantau: - RPJMN - RKP	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	
		8. Jumlah laporan pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup kehutanan dan konservasi sumber daya air secara berkala sesuai yang direncanakan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
		9. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup kehutanan dan konservasi sumber daya air	100%	100%	100%	100%	100%	
		10. Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup kehutanan dan konservasi sumber daya air	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
		11. % kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkup kehutanan dan konservasi sumber daya air dengan target/sasaran dalam rancangan RPJMN	100%	-	-	-	-	
		12. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup kehutanan dan konservasi sumber daya air dengan RKP dan pagu indikatif	100%	100%	100%	100%	100%	



**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		13. Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan rencana pembangunan nasional ( <i>termasuk substansi rencana dan pembiayaannya/rupee murni dan PHLN</i> ) terkait lingkup kehutanan dan konservasi sumber daya air	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	

## Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Kegiatan</b>	<b>Output</b>							Direktorat Kelautan dan Perikanan
Perencanaan pembangunan nasional terkait lingkup kelautan dan perikanan	Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup kelautan dan perikanan	1. % kesesuaian muatan rancangan RPJMN terkait lingkup kelautan dan perikanan dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih	100%	-	-	-	100%	
		2. Rancangan RPJMN terkait lingkup kelautan dan perikanan memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	100%	-	-	-	100%	
		3. % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup kelautan dan perikanan dengan RPJMN	100%	100%	100%	100%	100%	
		4. Rancangan RKP terkait lingkup kelautan dan perikanan memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	
		5. Jumlah dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup kelautan dan perikanan: - RPJMN - RKP	1 dokumen 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	
		6. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup kelautan dan perikanan: - RPJMN - RKP	- 100%	- 100%	100% 100%	- 100%	100% 100%	
		7. % program atau kegiatan dalam RKP dan RPJMN tahun berjalan terkait lingkup kelautan dan perikanan yang dipantau: - RPJMN - RKP	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		8. Jumlah laporan pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup kelautan dan perikanan secara berkala sesuai yang direncanakan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
		9. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup kelautan dan perikanan	100%	100%	100%	100%	100%	
		10. Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup kelautan dan perikanan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
		11. % kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkup kelautan dan perikanan dengan target/sasaran dalam rancangan RPJMN	100%	-	-	-	-	
		12. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup kelautan dan perikanan dengan RKP dan pagu indikatif	100%	100%	100%	100%	100%	
		13. Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan rencana pembangunan nasional ( <i>termasuk substansi rencana dan pembiayaannya/rupee mumi dan PHLN</i> ) terkait lingkup kelautan dan perikanan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	



**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Kegiatan</b>	<b>Output</b>							
Perencanaan pembangunan nasional terkait lingkup sumber daya energi, mineral, dan pertambangan	Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup sumber daya energi, mineral, dan pertambangan	1. % kesesuaian muatan rancangan RPJMN terkait lingkup sumber daya energi, mineral, dan pertambangan dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih	100%	-	-	-	100%	Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan
		2. Rancangan RPJMN terkait lingkup sumber daya energi, mineral, dan pertambangan memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	100%	-	-	-	100%	
		3. % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup sumber daya energi, mineral, dan pertambangan dengan RPJMN	100%	100%	100%	100%	100%	
		4. Rancangan RKP terkait lingkup sumber daya energi, mineral, dan pertambangan memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	
		5. Jumlah dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup sumber daya energi, mineral, dan pertambangan: - RPJMN - RKP	1 dokumen 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	
		6. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup sumber daya energi, mineral, dan pertambangan: - RPJMN - RKP	- 100%	- 100%	100% 100%	- 100%	100% 100%	

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		7. % program atau kegiatan mitra kerja dalam RKP dan RPJMN tahun berjalan terkait lingkup sumber daya energi, mineral, dan pertambangan yang dipantau: - RPJMN - RKP	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	
		8. Jumlah laporan pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup sumber daya energi, mineral, dan pertambangan secara berkala sesuai yang direncanakan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
		9. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup sumber daya energi, mineral, dan pertambangan	100%	100%	100%	100%	100%	
		10. Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup sumber daya energi, mineral, dan pertambangan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
		11. % kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkup sumber daya energi, mineral, dan pertambangan dengan target/sasaran dalam rancangan RPJMN	100%	-	-	-	-	
		12. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup sumber daya energi, mineral, dan pertambangan dengan RKP dan pagu indikatif	100%	100%	100%	100%	100%	

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		13. Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan rencana pembangunan nasional ( <i>termasuk substansi rencana dan pembiayaannya/rupee mumi dan PHLN</i> ) terkait lingkup sumber daya energi, mineral, dan pertambangan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	



Unit Kerja Eselon I: Kedeputian Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kegiatan	Output							Direktorat Lingkungan Hidup
Perencanaan pembangunan nasional terkait lingkup lingkungan hidup	Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup lingkungan hidup	1. % kesesuaian muatan rancangan RPJMN terkait lingkup lingkungan hidup dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih	100%	-	-	-	100%	
		2. Rancangan RPJMN terkait lingkup lingkungan hidup memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	100%	-	-	-	100%	
		3. % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup lingkungan hidup dengan RPJMN	100%	100%	100%	100%	100%	
		4. Rancangan RKP terkait lingkup lingkungan hidup memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	
		5. Jumlah dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup lingkungan hidup: - RPJMN - RKP	1 dokumen 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	
		6. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup lingkungan hidup: - RPJMN - RKP	- 100%	- 100%	100% 100%	- 100%	100% 100%	
		7. % program atau kegiatan mitra kerja dalam RKP dan RPJMN tahun berjalan terkait lingkup lingkungan hidup yang dipantau: - RPJMN - RKP	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		8. Jumlah laporan pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup lingkungan hidup secara berkala sesuai yang direncanakan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
		9. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup lingkungan hidup	100%	100%	100%	100%	100%	
		10. Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup lingkungan hidup	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
		11. % kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkup lingkungan hidup dengan target/sasaran dalam rancangan RPJMN	100%	-	-	-	-	
		12. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup lingkungan hidup dengan RKP dan pagu indikatif	100%	100%	100%	100%	100%	
		13. Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan rencana pembangunan nasional ( <i>termasuk substansi rencana dan pembiayaannya/rupee mumi dan PHLN</i> ) terkait lingkup lingkungan hidup	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	

## Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Sarana dan Prasarana

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Kegiatan</b>	<b>Output</b>							Direktorat Pengairan dan Irigasi
Perencanaan pembangunan nasional terkait lingkup pengairan dan irigasi	Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup pengairan dan irigasi	1. % kesesuaian muatan rancangan RPJMN terkait lingkup pengairan dan irigasi dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih	100%	-	-	-	100%	
		2. Rancangan RPJMN terkait lingkup pengairan dan irigasi memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	100%	-	-	-	100%	
		3. % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup pengairan dan irigasi dengan RPJMN	100%	100%	100%	100%	100%	
		4. Rancangan RKP terkait lingkup pengairan dan irigasi memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	
		5. Jumlah dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup pengairan dan irigasi: - RPJMN - RKP	1 dokumen 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	
		6. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup pengairan dan irigasi: - RPJMN - RKP	- 100%	- 100%	100% 100%	- 100%	100% 100%	
		7. % program atau kegiatan dalam RKP dan RPJMN tahun berjalan terkait lingkup pengairan dan irigasi yang dipantau: - RPJMN - RKP	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	



**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Sarana dan Prasarana

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		8. Jumlah laporan pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup pengairan dan irigasi secara berkala sesuai yang direncanakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
		9. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup pengairan dan irigasi	100%	100%	100%	100%	100%	
		10. Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup pengairan dan irigasi	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
		11. % kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkup pengairan dan irigasi dengan target/sasaran dalam rancangan RPJMN	100%	-	-	-	-	
		12. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup pengairan dan irigasi dengan RKP dan pagu indikatif	100%	100%	100%	100%	100%	
		13. Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan rencana pembangunan nasional (termasuk substansi rencana dan pembiayaannya/rupee mumi dan PHLN) terkait lingkup pengairan dan irigasi	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Sarana dan Prasarana

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Kegiatan</b>	<b>Output</b>							Direktorat Transportasi
Perencanaan pembangunan nasional terkait lingkup transportasi	Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup transportasi	1. % kesesuaian muatan rancangan RPJMN terkait lingkup transportasi dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih	100%	-	-	-	100%	
		2. Rancangan RPJMN terkait lingkup transportasi memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	100%	-	-	-	100%	
		3. % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup transportasi dengan RPJMN	100%	100%	100%	100%	100%	
		4. Rancangan RKP terkait lingkup transportasi memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	
		5. Jumlah dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup transportasi: - RPJMN - RKP	1 dokumen 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	
		6. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup transportasi: - RPJMN - RKP	- 100%	- 100%	100% 100%	- 100%	100% 100%	
		7. % program atau kegiatan dalam RKP dan RPJMN tahun berjalan terkait lingkup transportasi yang dipantau: - RPJMN - RKP	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Sarana dan Prasarana

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		8. Jumlah laporan pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup transportasi secara berkala sesuai yang direncanakan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
		9. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup transportasi	100%	100%	100%	100%	100%	
		10. Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup transportasi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
		11. % kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkup transportasi dengan target/sasaran dalam rancangan RPJMN	100%	-	-	-	-	
		12. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup transportasi dengan RKP dan pagu indikatif	100%	100%	100%	100%	100%	
		13. Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan rencana pembangunan nasional ( <i>termasuk substansi rencana dan pembiayaannya/rupee mumi dan PHLN</i> ) terkait lingkup transportasi	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	5 laporan	



**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Sarana dan Prasarana

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Kegiatan</b>	<b>Output</b>							
Perencanaan pembangunan nasional terkait lingkup permukiman dan perumahan	Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup permukiman dan perumahan	1. % kesesuaian muatan rancangan RPJMN terkait lingkup permukiman dan perumahan dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih	100%	-	-	-	100%	Direktorat Permukiman dan Perumahan
		2. Rancangan RPJMN terkait lingkup permukiman dan perumahan memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	100%	-	-	-	100%	
		3. % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup permukiman dan perumahan dengan RPJMN	100%	100%	100%	100%	100%	
		4. Rancangan RKP terkait lingkup permukiman dan perumahan memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	
		5. Jumlah dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup permukiman dan perumahan: - RPJMN - RKP	1 dokumen 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	
		6. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup permukiman dan perumahan: - RPJMN - RKP	- 100%	- 100%	100% 100%	- 100%	100% 100%	
		7. % program atau kegiatan dalam RKP dan RPJMN tahun berjalan terkait lingkup permukiman dan perumahan yang dipantau: - RPJMN - RKP	- 100%	- 100%	100% 100%	- 100%	100% 100%	

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Sarana dan Prasarana

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		8. Jumlah laporan pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup permukiman dan perumahan secara berkala sesuai yang direncanakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
		9. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup permukiman dan perumahan	100%	100%	100%	100%	100%	
		10. Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup permukiman dan perumahan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
		11. % kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkup permukiman dan perumahan dengan target/sasaran dalam rancangan RPJMN	100%	-	-	-	-	
		12. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup permukiman dan perumahan dengan RKP dan pagu indikatif	100%	100%	100%	100%	100%	
		13. Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan rencana pembangunan nasional (termasuk substansi rencana dan pembiayaannya/rupee murni dan PHLN) terkait lingkup permukiman dan perumahan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	

## Unit Kerja Eselon I: Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kegiatan	Output							Direktorat Energi, Telekomunikasi, dan Informatika
Perencanaan pembangunan nasional terkait lingkup energi, telekomunikasi, dan informatika	Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup energi, telekomunikasi, dan informatika	1. % kesesuaian muatan rancangan RPJMN terkait lingkup energi, telekomunikasi, dan informatika dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih	100%	-	-	-	100%	
		2. Rancangan RPJMN terkait lingkup energi, telekomunikasi, dan informatika memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	100%	-	-	-	100%	
		3. % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup energi, telekomunikasi, dan informatika dengan RPJMN	100%	100%	100%	100%	100%	
		4. Rancangan RKP terkait lingkup energi, telekomunikasi, dan informatika memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	
		5. Jumlah dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup energi, telekomunikasi, dan informatika: - RPJMN - RKP	1 dokumen 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	
		6. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup energi, telekomunikasi, dan informatika: - RPJMN - RKP	- 100%	- 100%	100% 100%	- 100%	100% 100%	
		7. % program atau kegiatan mitra kerja dalam RKP dan RPJMN tahun berjalan terkait lingkup energi, telekomunikasi, dan informatika yang dipantau: - RPJMN - RKP	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	



**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Sarana dan Prasarana

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		8. Jumlah laporan pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup energi, telekomunikasi, dan informatika secara berkala sesuai yang direncanakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
		9. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup energi, telekomunikasi, dan informatika	100%	100%	100%	100%	100%	
		10. Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup energi, telekomunikasi, dan informatika	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
		11. % kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkup energi, telekomunikasi, dan informatika dengan target/sasaran dalam rancangan RPJMN	100%	-	-	-	-	
		12. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup energi, telekomunikasi, dan informatika dengan RKP dan pagu indikatif	100%	100%	100%	100%	100%	
		13. Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan rencana pembangunan nasional ( <i>termasuk substansi rencana dan pembiayaannya/rupee mumi dan PHLN</i> ) terkait lingkup energi, telekomunikasi, dan informatika	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Sarana dan Prasarana

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Kegiatan</b>	<b>Output</b>							
Perencanaan pembangunan nasional terkait lingkup pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta	Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta	1. % kesesuaian muatan rancangan RPJMN terkait lingkup pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih	100%	-	-	-	100%	Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta
		2. Rancangan rencana pembangunan infrastruktur melalui KPS (PPP Book) memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	100%	-	-	-	100%	
		3. % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta dengan RPJMN	100%	100%	100%	100%	100%	
		4. % rancangan RKP terkait lingkup pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta sesuai rencana pembangunan infrastruktur melalui KPS (PPP Book)	70%	75%	80%	85%	90%	
		5. Jumlah dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta: - RPJMN - RKP	1 dokumen 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	
		6. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta: - RPJMN - RKP	- 100%	- 100%	100% 100%	- 100%	100% 100%	

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Sarana dan Prasarana

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		7. % program atau kegiatan dalam RKP dan RPJMN tahun berjalan terkait lingkup pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta yang dipantau: - RPJMN - RKP	- 100%	- 100%	100% 100%	- 100%	100% 100%	
		8. Jumlah laporan pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta secara berkala sesuai yang direncanakan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	
		9. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta	100%	100%	100%	100%	100%	
		10. Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	
		11. % kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkup pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta dengan target/sasaran dalam rancangan RPJMN	100%	-	-	-	100%	
		12. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta dengan rencana pembangunan infrastruktur melalui KPS (PPP Book)	70%	75%	80%	85%	90%	
		13. Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan rencana pembangunan nasional terkait lingkup pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	



**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Kegiatan</b>	<b>Output</b>							
Perencanaan pembangunan nasional terkait lingkup pengembangan wilayah	Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup pengembangan wilayah	1. % kesesuaian muatan rancangan RPJMN terkait lingkup pengembangan wilayah dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih	100%	-	-	-	100%	Direktorat Pengembangan Wilayah
		2. Rancangan RPJMN terkait lingkup pengembangan wilayah memiliki sasaran dan indikator yang terukur	100%	-	-	-	100%	
		3. % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup pengembangan wilayah dengan RPJMN	100%	100%	100%	100%	100%	
		4. Rancangan RKP terkait lingkup pengembangan wilayah memiliki sasaran dan indikator yang terukur	100%	100%	100%	100%	100%	
		5. Jumlah dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup pengembangan wilayah: - RPJMN - RKP	1 dokumen 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	
		6. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup pengembangan wilayah: - RPJMN - RKP	- 100%	- 100%	100% 100%	- 100%	100% 100%	
		7. % program atau kegiatan dalam RKP dan RPJMN tahun berjalan terkait lingkup pengembangan wilayah yang dipantau: - RPJMN - RKP	- 100%	- 100%	100% 100%	- 100%	100% 100%	

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		8. Jumlah laporan pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup pengembangan wilayah secara berkala sesuai yang direncanakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
		9. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup pengembangan wilayah	100%	100%	100%	100%	100%	
		10. Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup pengembangan wilayah	1 laporan	1 laporan	2 laporan	1 laporan	2 laporan	
		11. % kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkup pengembangan wilayah dengan target/sasaran dalam rancangan RPJMN	100%	-	-	-	-	
		12. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup pengembangan wilayah dengan RKP dan pagu indikatif	100%	100%	100%	100%	100%	
		13. Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan rencana pembangunan nasional ( <i>termasuk substansi rencana dan pembiayaannya/rupee mumi dan PHLN</i> ) terkait lingkup pengembangan wilayah	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	

## Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kegiatan	Output							Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal
Perencanaan pembangunan nasional terkait lingkup kawasan khusus dan daerah tertinggal	Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup kawasan khusus dan daerah tertinggal	1. % kesesuaian muatan rancangan RPJMN terkait lingkup kawasan khusus dan daerah tertinggal dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih	100%	-	-	-	100%	
		2. Rancangan RPJMN terkait lingkup kawasan khusus dan daerah tertinggal memiliki sasaran dan indikator yang terukur	100%	-	-	-	100%	
		3. % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup kawasan khusus dan daerah tertinggal dengan RPJMN	100%	100%	100%	100%	100%	
		4. Rancangan RKP terkait lingkup kawasan khusus dan daerah tertinggal memiliki sasaran dan indikator yang terukur	100%	100%	100%	100%	100%	
		5. Jumlah dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup kawasan khusus dan daerah tertinggal: - RPJMN - RKP	1 dokumen 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	
		6. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup kawasan khusus dan daerah tertinggal: - RPJMN - RKP	- 100%	- 100%	100% 100%	- 100%	100% 100%	
		7. % program atau kegiatan dalam RKP dan RPJMN tahun berjalan terkait lingkup kawasan khusus dan daerah tertinggal yang dipantau: - RPJMN - RKP	60% 70%	60% 70%	60% 70%	60% 70%	60% 70%	



## Unit Kerja Eselon I: Kedeputian Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		8. Jumlah laporan pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup kawasan khusus dan daerah tertinggal secara berkala sesuai yang direncanakan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
		9. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup kawasan khusus dan daerah tertinggal	100%	100%	100%	100%	100%	
		10. Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup kawasan khusus dan daerah tertinggal	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	
		11. % kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkup kawasan khusus dan daerah tertinggal dengan target/sasaran dalam rancangan RPJMN	100%	-	-	-	-	
		12. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup kawasan khusus dan daerah tertinggal dengan RKP dan pagu indikatif	100%	100%	100%	100%	100%	
		13. Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan rencana pembangunan nasional (termasuk substansi rencana dan pembiayaannya/rupee mumi dan PHLN) terkait lingkup kawasan khusus dan daerah tertinggal	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	

## Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

[illegible]

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		9. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup otonomi daerah	100%	100%	100%	100%	100%	
		10. Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup otonomi daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
		11. % kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkup otonomi daerah dengan target/sasaran dalam rancangan RPJMN	100%	-	-	-	-	
		12. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup otonomi daerah dengan RKP dan pagu indikatif	100%	100%	100%	100%	100%	
		13. Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan rencana pembangunan nasional ( <i>termasuk substansi rencana dan pembiayaannya/rupee murni dan PHLN</i> ) terkait lingkup otonomi daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	



**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Kegiatan</b>	<b>Output</b>							Direktorat Perkotaan dan Perdesaan
Perencanaan pembangunan nasional terkait lingkup perkotaan dan perdesaan	Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup perkotaan dan perdesaan	1. % kesesuaian muatan rancangan RPJMN terkait lingkup perkotaan dan perdesaan dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih	100%	-	-	-	100%	
		2. Rancangan RPJMN terkait lingkup perkotaan dan perdesaan memiliki sasaran dan indikator yang terukur	100%	-	-	-	100%	
		3. % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup perkotaan dan perdesaan dengan RPJMN	100%	100%	100%	100%	100%	
		4. Rancangan RKP terkait lingkup perkotaan dan perdesaan memiliki sasaran dan indikator yang terukur	100%	100%	100%	100%	100%	
		5. Jumlah dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup perkotaan dan perdesaan: - RPJMN - RKP	1 dokumen 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	
Kegiatan pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup perkotaan dan perdesaan	Laporan pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup perkotaan dan perdesaan	6. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup perkotaan dan perdesaan: - RPJMN - RKP	- 100%	- 100%	100% 100%	- 100%	100% 100%	
		7. % program atau kegiatan mitra kerja dalam RKP dan RPJMN tahun berjalan terkait lingkup perkotaan dan perdesaan yang dipantau: - RPJMN - RKP	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	
		8. Jumlah laporan pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup perkotaan dan perdesaan secara berkala sesuai yang direncanakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		9. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup perkotaan dan perdesaan	100%	100%	100%	100%	100%	
		10. Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup perkotaan dan perdesaan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
		11. % kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkup perkotaan dan perdesaan dengan target/sasaran dalam rancangan RPJMN	100%	-	-	-	-	
		12. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup perkotaan dan perdesaan dengan RKP dan pagu indikatif	100%	100%	100%	100%	100%	
		13. Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan rencana pembangunan nasional (termasuk substansi rencana dan pembiayaannya/rupee mumi dan PHLN) terkait lingkup perkotaan dan perdesaan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	

## Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kegiatan	Output							Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan
Perencanaan pembangunan nasional terkait lingkup tata ruang dan pertanahan	Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup tata ruang dan pertanahan	1. % kesesuaian muatan rancangan RPJMN terkait lingkup tata ruang dan pertanahan dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih	100%	-	-	-	100%	
		2. Rancangan RPJMN terkait lingkup tata ruang dan pertanahan memiliki sasaran dan indikator yang terukur	100%	-	-	-	100%	
		3. % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup tata ruang dan pertanahan dengan RPJMN	100%	100%	100%	100%	100%	
		4. Rancangan RKP terkait lingkup tata ruang dan pertanahan memiliki sasaran dan indikator yang terukur	100%	100%	100%	100%	100%	
		5. Jumlah dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup tata ruang dan pertanahan: - RPJMN - RKP	1 dokumen 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	
		6. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup tata ruang dan pertanahan: - RPJMN - RKP	- 100%	- 100%	100% 100%	- 100%	100% 100%	
		7. % program atau kegiatan mitra kerja dalam RKP dan RPJMN tahun berjalan terkait lingkup tata ruang dan pertanahan yang dipantau: - RPJMN - RKP	- 100%	- 100%	80% 100%	- 100%	100% 100%	
		8. Jumlah laporan pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup tata ruang dan pertanahan secara berkala sesuai yang direncanakan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	



**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		9. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup tata ruang dan pertanahan	100%	100%	100%	100%	100%	
		10. Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup tata ruang dan pertanahan	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	
		11. % kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkup tata ruang dan pertanahan dengan target/sasaran dalam rancangan RPJMN	100%	-	-	-	-	
		12. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup tata ruang dan pertanahan dengan RKP dan pagu indikatif	100%	100%	100%	100%	100%	
		13. Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan rencana pembangunan nasional ( <i>termasuk substansi rencana dan pembiayaannya/rupee mumi dan PHLN</i> ) terkait lingkup tata ruang dan pertanahan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	

## Unit Kerja Eselon I: Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan

[illegible]

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Pendanaan Pembangunan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		11. Jumlah laporan evaluasi atas pelaksanaan perencanaan pendanaan pembangunan nasional serta pengembangannya	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
		12. % ketepatan waktu penyelesaian laporan koordinasi pengelolaan perencanaan pendanaan pembangunan nasional	100%	100%	100%	100%	100%	
		13. Jumlah laporan koordinasi pengelolaan perencanaan pendanaan pembangunan nasional	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	



## Unit Kerja Eselon I: Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kegiatan	Output							Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan
Perencanaan pembangunan nasional bidang alokasi pendanaan pembangunan	Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional bidang alokasi pendanaan pembangunan	1. Jumlah dokumen usulan rancangan alokasi pendanaan pembangunan nasional dalam RPJMN	1 dokumen	-	-	-	-	
		2. % rancangan alokasi pendanaan pembangunan nasional dalam RPJMN memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	80%	-	-	-	-	
		3. Jumlah dokumen usulan rancangan alokasi pendanaan pembangunan nasional dalam rancangan RKP	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
		4. % usulan rencana alokasi pendanaan pembangunan nasional dalam RPJMN yang dijabarkan dalam rancangan RKP	70%	80%	90%	100%	100%	
		5. % rancangan RKP bidang alokasi pendanaan pembangunan memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	80%	90%	100%	100%	100%	
		6. % ketepatan waktu penyelesaian rancangan kebijakan alokasi pendanaan pembangunan nasional (pagu indikatif)	100%	100%	100%	100%	100%	
		7. % ketepatan waktu penyelesaian laporan pemantauan (pasca Perpres rincian APBN) atas pengelolaan alokasi pendanaan pembangunan nasional	100%	100%	100%	100%	100%	
		8. Jumlah laporan pemantauan atas pengelolaan alokasi pendanaan pembangunan nasional	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
		9. % ketepatan waktu penyelesaian laporan evaluasi atas pengelolaan alokasi pendanaan pembangunan nasional	100%	100%	100%	100%	100%	
		10. Jumlah laporan evaluasi atas pengelolaan alokasi pendanaan pembangunan nasional	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Pendanaan Pembangunan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		11. % ketepatan waktu penyelesaian laporan koordinasi pengelolaan alokasi pendanaan pembangunan nasional	100%	100%	100%	100%	100%	
		12. Jumlah laporan koordinasi pengelolaan alokasi pendanaan pembangunan nasional	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	

## Unit Kerja Eselon I: Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan

[illegible]



## Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Pendanaan Pembangunan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Kegiatan</b>	<b>Output</b>							Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral
Perencanaan pembangunan nasional bidang pendanaan luar negeri multilateral	Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional bidang pendanaan luar negeri multilateral	1. Tersusunnya naskah rancangan rencana pendanaan luar negeri multilateral jangka menengah	7 dokumen	6 dokumen	4 dokumen	8 dokumen	5 dokumen	
		2. % kesesuaian prioritas kerjasama pendanaan multilateral dengan mitra pembangunan (donor/kreditor) dan prioritas RPJMN	80%	85%	90%	95%	100%	
		3. % kesesuaian kegiatan dalam naskah rancangan rencana pendanaan luar negeri multilateral jangka menengah dengan Rencana Pendanaan Jangka Menengah	80%	85%	90%	95%	100%	
		4. Tersusunnya daftar kegiatan pendanaan luar negeri multilateral periode tahunan	6 dokumen	6 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	
		5. % kesesuaian daftar kegiatan pendanaan luar negeri multilateral periode tahunan dengan Rencana Pendanaan Tahunan	80%	85%	90%	95%	100%	
		6. % rencana kegiatan yang mendapatkan komitmen pendanaan multilateral terhadap daftar kegiatan yang disiapkan/diusulkan	60%	70%	80%	80%	80%	
		7. Tersusunnya rancangan kebijakan rencana pendanaan luar negeri multilateral	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
		8. Tersusunnya laporan pemantauan atas pengelolaan rencana pendanaan luar negeri multilateral	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
		9. Tersusunnya laporan evaluasi atas pengelolaan rencana/evaluasi kebijakan/kajian pendanaan luar negeri multilateral	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
		10. Tersusunnya laporan koordinasi pengelolaan rencana pendanaan luar negeri multilateral	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Pendanaan Pembangunan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		11. Tersusunnya laporan menghadiri sidang/forum internasional di dalam dan luar negeri	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	

## Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Pendanaan Pembangunan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kegiatan	Output							
Perencanaan pembangunan nasional bidang pendayagunaan pendanaan pembangunan	Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional bidang pendayagunaan pendanaan pembangunan	1. Tersusunnya rancangan rencana penarikan PHLN dalam rangka penyusunan pagu indikatif RAPBN yang tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Direktorat Pendayagunaan Pendanaan Pembangunan
		2. Jumlah K/L yang menyampaikan laporan konsolidasi pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan	70%	75%	80%	90%	100%	
		3. Jumlah Bappeda Provinsi yang menyampaikan laporan konsolidasi pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan	70%	75%	80%	90%	100%	
		4. % pelaksanaan rencana pembangunan (fungsi, sub fungsi, program, dan kegiatan dalam DIPA K/L) yang dipantau	70%	75%	80%	90%	100%	
		5. Tingkat permasalahan dalam pelaksanaan PHLN terkait dengan pendanaan pembangunan yang ditindaklanjuti	80%	80%	80%	90%	90%	
		6. Tersusunnya rancangan laporan kinerja hasil pemantauan pelaksanaan pinjaman luar negeri yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	
		7. Jumlah laporan konsolidasi pelaksanaan rencana pembangunan K/L	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
		8. Jumlah laporan evaluasi atas pelaksanaan pelaporan rencana pembangunan K/L dan Bappeda Provinsi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
		9. % pemutakhiran ( <i>updating</i> ) dan pemeliharaan Aplikasi Database Pemantauan	100%	100%	100%	100%	100%	



## Unit Kerja Eselon I: Kedeputian Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kegiatan	Output							Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
Evaluasi kinerja pembangunan daerah	Hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	1. % kesesuaian kebijakan rencana pembangunan di daerah terhadap Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	
		2. % hasil evaluasi pembangunan daerah terhadap rancangan dokumen lima tahunan (RPJMN)	100%	-	-	-	-	
		3. % hasil evaluasi pembangunan daerah terhadap rancangan dokumen tahunan (RKP)	-	100%	100%	100%	100%	
		4. % ketepatan waktu penyelesaian pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	
		5. % kesesuaian muatan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi tematik pembangunan daerah dengan RPJMN	100%	100%	100%	100%	100%	
		6. % hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah terhadap pelaksanaan kebijakan prioritas pembangunan dalam RPJMN/RKP (evaluasi tematik)	100%	100%	100%	100%	100%	
		7. % daerah yang memiliki dokumen pedoman evaluasi kinerja pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	
		8. Jumlah dokumen evaluasi di bidang evaluasi kinerja pembangunan daerah tingkat provinsi	33 dokumen	33 dokumen	33 dokumen	33 dokumen	33 dokumen	

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Kegiatan</b>	<b>Output</b>							
Perencanaan pembangunan nasional bidang evaluasi kinerja pembangunan sektoral	Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional bidang evaluasi kinerja pembangunan sektoral	1. % hasil evaluasi pembangunan sektoral terhadap rancangan dokumen lima tahunan (RPJMN)	100%	-	-	-	-	Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral
		2. % hasil evaluasi kinerja pembangunan sektoral terhadap rancangan dokumen tahunan (RKP)	-	100%	100%	100%	100%	
		3. % pemantauan pelaksanaan kebijakan prioritas pembangunan sektoral dalam RKP sesuai rencana	100%	100%	100%	100%	100%	
		4. % hasil evaluasi kinerja pembangunan sektoral terhadap pelaksanaan kebijakan prioritas pembangunan dalam RPJMN/RKP (evaluasi tematik)	100%	100%	100%	100%	100%	
		5. % hasil evaluasi kinerja pembangunan sektoral pencapaian RPJMN (midterm dan final term)	100%	-	100%	-	-	
		6. % ketepatan waktu penyelesaian pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan sektoral	100%	100%	100%	100%	100%	
		7. Jumlah dokumen pedoman evaluasi pembangunan sektoral	2 dokumen	1 dokumen	-	-	-	

## Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kegiatan	Output							Direktorat Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan
Pengembangan kebijakan dalam bidang sistem dan pelaporan evaluasi kinerja pembangunan	Kebijakan dalam bidang sistem dan pelaporan evaluasi kinerja pembangunan	1. % pengembangan sistem evaluasi dan pelaporan kinerja pembangunan nasional (buku pedoman RPJMN, Renstra K/L, Renja K/L, manual pengukuran kinerja, indikator kinerja pembangunan nasional, manual pelaksanaan money)	75%	80%	100%	100%	100%	
		2. % kesesuaian pelaporan hasil evaluasi kinerja pembangunan dengan standar/pedoman yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	
		3. % koordinasi pengembangan sistem evaluasi dan pelaporan kinerja pembangunan nasional sesuai rencana	100%	100%	100%	100%	100%	
		4. % intensitas pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi ke dalam proses perencanaan dan penganggaran	100%	100%	100%	100%	100%	
		5. % pemantauan ketepatan indikator kinerja dalam dokumen perencanaan (RPJMN dan RKP) sesuai dengan rencana	100%	100%	100%	100%	100%	
		6. % ketepatan waktu pelaporan kegiatan pengembangan kebijakan dalam bidang sistem dan pelaporan evaluasi kinerja pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	
		7. Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan sistem dan pelaporan evaluasi kinerja pembangunan sesuai dengan rencana	100%	100%	100%	100%	100%	



**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Inspektorat Utama

[illegible]

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Unit Kerja Eselon I: Inspektorat Utama

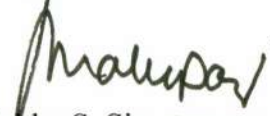
PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Kegiatan</b>	<b>Output</b>							
Kegiatan pengawasan di bidang kinerja kelembagaan	Laporan hasil pengawasan di bidang kinerja kelembagaan	1. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan konsultasi	60%	65%	70%	75%	80%	Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan
		2. % penerapan SAKIP (renstra, penilaian kinerja, kontrak kinerja, pengendalian, dll)	-	-	-	-	100%	
		3. Ketepatan waktu penyelesaian LHP	40%	50%	60%	70%	80%	
		4. Jumlah dokumen pelaksanaan pengawasan di bidang kinerja kelembagaan	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

**ARMIDA S. ALISJAHBANA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum

  
Delthy S. Simatupang

**ANAK LAMPIRAN V**  
**PERATURAN MENTERI PPN/**  
**KEPALA BAPPENAS**  
**NOMOR 1 TAHUN 2010**

Formulir 2

**KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

PROGRAM/KEGIATAN	BASELINE 2009	ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)				
		2010	2011	2012	2013	2014
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A. ALOKASI PROGRAM GENERIK</b>	<b>204.713</b>	<b>306.450</b>	<b>504.917</b>	<b>383.900</b>	<b>395.100</b>	<b>401.300</b>
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas	69.704	142.867	341.217	345.000	361.000	367.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas	20.309	20.069	160.000*)	35.000	30.000	30.000
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas	3.500	3.500	3.700	3.900	4.100	4.300
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Bappenas	111.200	140.014	-	-	-	-
<b>B. ALOKASI PROGRAM TEKNIS</b>	<b>194.547</b>	<b>251.833</b>	<b>265.500</b>	<b>292.000</b>	<b>301.000</b>	<b>298.000</b>
<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL</b>						
Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (RPJPN, RPJMN, RKP)	20.099	27.859	23.000	27.000	30.000	23.000
Kegiatan Pelaksanaan Tugas dari Rekomendasi Kebijakan Pembangunan	53.722	53.650	53.000	54.000	55.000	54.000
Kegiatan Penyusunan Pendanaan Pembangunan Strategis Sektoral, Lintas Sektor, dan Wilayah	32.288	40.754	45.000	53.000	54.000	55.000
Kegiatan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional	6.618	9.690	17.500	17.000	19.000	19.000



KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PROGRAM/KEGIATAN	BASELINE 2009	ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)				
		2010	2011	2012	2013	2014
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional	12.575	23.069	29.000	32.000	32.000	33.000
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan, Pendanaan, Pemantauan, Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional	69.245	96.811	98.000	109.000	111.000	114.000
<b>TOTAL SEMUA PROGRAM</b>	<b>399.260</b>	<b>558.283</b>	<b>770.417</b>	<b>675.900</b>	<b>696.100</b>	<b>699.300</b>

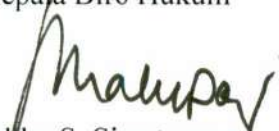
\*) Termasuk Rp. 115 miliar untuk pembangunan gedung baru Bappenas

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum

  
Delthy S. Simatupang